**HEGEMONI POLITIK DALAM DISKURSUS
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SULSEL**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Magister Sosiologi Pada Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin**

Disusun oleh :

**WAHYUDDIN BAKRI
P1600213003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASERJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016**

ABSTRAK

WAHYUDDIN BAKRI. *Hegemoni Politik Dalam Diskursus Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Selatan 2013 (dibimbing oleh Rahmat Muhammad Dan Sakaria)*

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi teks berita Pilgub 2013 dan praktik diskursus ekonomi politik Koran Rakyat Sulsel, Koran Tribun Timur dan Koran Sindo. Menganalisis kecenderungan konstruksi media pada perilaku pemilih. Tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan CDA model Norman Fairclough. Sumber data berupa tinjauan situasional Pilgub 2013, Faktor Internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola rutinitas media dan dokumentasi teks yang di reduksi pada tahun 2012 sampai 2013.

Hasil Analisis tekstual menunjukkan konstruksi wacana tiga media lokal pasangan calon, cenderung menjadikan koran sebagai alat kampanye politik. Hasil interpretasi Koran Rakyat Sulsel berpihak ke SYL, Tribun Timur ke IA dan Koran Sindo lebih pada keseragaman isu politik kandidat. Praktek Diskursus ekonomi politik media tiga media lokal, cenderung pada relasi elit politik dan partai politik, narasi yang bersifat tendensius dan memilih nara sumber berprofesi politisi dibanding akademisi yang netral. Sedangkan kecenderungan konstruksi wacana menunjukkan perilaku primordialisme pada dominasi Syl atas etnisitasnya dan Aziz atas kelompok muslimah, pemilih rasional kalkulatif pada dominasi mendukung program unggulan Sayang dan karya pembangunan IAS, perilaku emosional menunjukkan relasi antar aktor politik seperti bupati, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dan pemilih sosial pada organisasi sosial sebagai organisasi yang berkepentingan.

Key Word : Hegemoni Politik, Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

WAHYUDDIN BAKRI. Political Hegemony In Discourse Head of Regional Elections In South Sulawesi 2013 (Supervised by Rahmat Muhammad And Sakaria)

This aims of the study were to analyze text construction Pilgub 2013 and practices political economy discourse of Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur and Sindo News Paper, to analyze trend of media construction on voter behavior in Pilgub 2013.

This was a qualitative research with Norman Fairclough critical approach models. Sources of data in the form a review of situational Governor Election 2013, Internal and external factors that affect the pattern of media routines and documentation text in a reduction in 2012 to 2013.

The results of the research indicated that CDA in three local media, tended to make the candidate instrument of political campaigns. Rakyat Sulsel was interpreted to favor the SYL, Tribun Timur for IAS and the Koran Sindo was more interested in the uniformity of political issues, of the three candidates, and political economy practice of thee three local media tended to have relation to political elite and certain political parteis, the news proportion was tendentions and the resource persons were more politicians than more neutral academics. Media construction presented in primordialism behavior, domination Syl on ethnicity and Aziz on group of Muslim, rational voters calculative domination support excellent programs Syl and development works IAS, emotional behavior shows relations between political actors, religious leaders, traditional leaders and society leaders and voters of social groups social KNPI and KPPSI as interested organizations.

Key Word : *Political Hegemony, Head Of Regional Election*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Teori Hegemoni Dan Kekuasaan	11
2.2. Konsep Media Sebagai Senjata Politik, Ekonomi Politik Media	19
2.3. Konsep Aktor Politik, Struktur Sosial Dan Dominasi Kekuasaan	22
2.4. Prilaku Pemilih	29
2.5. Kerangka Pemikiran	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Paradigma Dan Pendekatan Penelitian	36
3.2. Setting Penelitian	38
3.3. Metode Pengumpulan Data	39
3.4. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	43
4.2. Analisis Teks Dan Praktik Ekonomi Politik Media Pilgub 2013	58
4.2.1. Analisis Teks Berita Pemilukada Sulsel 2013	58
A. Critical Discourse Analisis Teks Harian Rakyat Sulsel	60
B. Critical Discourse Analisis Teks Tribun Timur	78
C. Critical Discourse Analisis Teks Koran Sindo	88
4.2.2. Praktik Diskursus Ekonomi Politik Media	99
A. Praktik Diskursus & Sistem Kerja Harian Rakyat Sulsel	99
B. Praktik Diskursus & Sistem Kerja Tribun Timur	106
C. Praktik Diskursus & Sistem Kerja Koran Sindo	110
D. Perbandingan Ekonomi Politik Media	112
4.3. Kecendrungan Konstruksi Media Terhadap Prilaku Pemilih	118
A. Segmentasi Perilaku Primordialisme	120
B. Segmentasi Rasional Kalkulatif	125
C. Segmentasi Perilaku Emosional	129
D. Segmentasi Perilaku Sosial	133

BAB V KESIMPULAN	137
5.1. Kesimpulan	137
5.2. Saran-Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
BIOGRAFI PENELITI	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi dipercaya sebagai era perubahan, reformasi di berbagai bidang terutama lembaga dan mekanisme berdemokrasi telah mengubah struktur kepartaian, parlemen, dan mekanisme mencapai posisi kekuasaan. Dari semula hanya ada tiga partai yang berkontestasi, kini menjadi multipartai serta mekanisme pemilu dari pemilihan tak langsung dengan daftar tertutup, berganti menjadi pemilihan langsung dengan daftar terbuka dan suara terbanyak. Pemilihan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan suara terbesar rakyat, sebagai suatu perubahan pada struktur dan mekanisme politik demi untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih besar dengan harapan sistem pemilu akan menciptakan iklim demokrasi yang berkeadilan dan terbebas atas dasar kepentingan tertentu.

Menurut Louis O'kastrof dalam (Zuhdhi Ibrahim ELSAM, 2010) bahwa jika sebuah negara menyatakan menganut demokrasi "ala barat" maka secara tidak langsung juga menyatakan penganut sistem ekonomi kapitalistik. Dengan dilatari sistem ekonomi kapitalistik, sistem demokrasi memiliki potensi-potensi kegagalan yang besar, terutama dalam mengatur hubungan ekonomi dan politik dibalik perumusan kebijakan publik. Praktek suap, kolusi dan berbagai teknik mempengaruhi kekuasaan politik. Karena itulah, diperlukan aturan tentang persoalan konflik kepentingan bisnis dan

politik dalam sebuah negara demokrasi, khususnya di Indonesia. Tanpa ada aturan, demokrasi tidak akan mencapai tingkat substansialnya, malah sebaliknya akan menjadi alat bagi kelompok kapitalis untuk memburu rente dan memperkaya diri sendiri dengan cara membeli kebijakan.

Bagi mereka mempertahankan serta melestarikan kekuasaan ekonomi dan politik kapitalisme dengan memanfaatkan media massa. Menurut Stuart Hall, bahwa media massa merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke 20 untuk mempertahankan, melestarikan, dan melembagakan dominasinya untuk melemahkan dan meniadakan potensi tanding dari pihak pihak yang dikuasai (Bungin, 2008: 29).

Sebagaimana yang dikatakan Gramsci tentang kepemimpinan intelektual dan moral yang kemudian dikenal hegemoni dengan dominasi kultural (ideologi dominan), maka kapitalisme telah mengambil alih kekuatan ini melalui penguasaan kapital dan dominasi hegemoninya melalui wacana dalam konstruksi realitasnya dalam media massa. Seperti dikatakan Foucault bahwa terdapat relasi pengetahuan dan power untuk mencapai suatu kekuasaan (Foucault, 2002: 201).

Dominasi diperoleh dengan menyebarkan dan mempopulerkan suatu pandangan, membuatnya sebagai nalar awam (*common sense*) dan merekonstruksinya sebagai suatu kewajaran dan kebenaran. Peran media sangat besar dalam proses tersebut sebagai instrumen hegemoni sekaligus menjadi arena pertarungan kepentingan di antara relasi diskursif media, kekuasaan, politik dan ekonomi. Posisi media dalam konteks ini

sangat signifikan sebab berada tepat di tengah pusaran kelompok kepentingan utamanya penguasa dan pemodal dan media menjadi basis transformasi ideologi bagi kekuasaan yang dominan.

Era demokrasi liberal seperti sekarang, media tidak cukup dipandang hanya sebagai kekuatan *civil society* yang harus dijamin kebebasannya, namun harus juga dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat. Hal ini perlu dicermati secara kritis oleh para pendukung demokrasi termasuk para jurnalis. Jangan sampai kekuatan demokrasi dibelokkan “atas nama kebebasan pers” untuk kepentingan politik para kapitalis (Subiakto Dkk, 2014: 134)

Kemunculan media di Indonesia lebih dimotivasi oleh ideologi perjuangan rakyat atau sebagai basis transformasi wacana pergerakan sosial untuk melawan kolonialisme. Melalui media konvensional seperti surat kabar dan radio ideologi nasionalisme dan pesan-pesan untuk meraih kemerdekaan disampaikan kepada rakyat. Tokoh pergerakan kemerdekaan masa itu adalah juga perintis pers yang menyuarakan kontra hegemonik demi perubahan sosial dan untuk melepaskan diri dari cengkaman kolonialisme (Kusumaningrat, 2006:11).

Penguasaan media oleh kelompok borjuasi khususnya elit politik tertentu secara nyata berimplikasi terhadap arus informasi di ruang publik. Fenomena yang muncul kemudian khususnya aktual dalam kajian kritis sosiologi politik dan komunikasi adalah hegemoni politik dalam wacana media dan demokrasi. Problem utamanya adalah konstruksi realitas politik

dalam teks media yang cenderung menampilkan narasi-narasi keberpihakannya pada kelompok-kelompok politik tertentu akibatnya akan berpengaruh pada perilaku pemilih atau konstituen.

Dinamika Pemilu di Indonesia merupakan contoh kasus yang mengungkap realitas itu. Temuan data hasil analisis Ibnu Hamad pada masa kampanye Pemilu/Pilpres 1999, menyimpulkan bahwa surat kabar *mainstream* nasional hingga lokal; Kompas, Suara, Pembaruan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Haluan, Kedaulatan, Rakyat, Bali Post, Jawa Pos, dan Fajar, 1) belum menjadikan liputan kampanye sebagai sarana atau alat untuk menciptakan iklim demokratis, 2) belum sampai menyajikan aspek substantif mengenai parpol, 3) belum berfungsi sebagai ruang publik (*public sphere*) yang terbebas dari kepentingan politik golongan dan ekonomi-pasar dalam membuat liputan-liputan politik (Ibnu Hamad, 2004: 29).

Demikian juga hasil riset Lembaga Survei Indonesia (Rilis LSI, 2012), menyimpulkan bahwa, 1) sering muncul opini bahwa berita oleh media masa dibingkai (*frame*) oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu untuk memengaruhi sikap dan perilaku pemilih sesuai dengan *framing* tersebut, 2) berita media massa diyakini punya pengaruh partisan, yakni menguntungkan partai tertentu, dan sebaliknya menjatuhkan partai yang lain.

Gejala tersebut juga terjadi di level pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan Eksekutif, Gubernur, Walikota dan Bupati. Data

observasi awal pada tahun 2013 yang dihimpun peneliti mengindikasikan bahwa berita politik yang dipublikasi oleh media *mainstream* lokal di Sulawesi Selatan di antaranya adalah Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran Sindo, tidak hanya merepresentasikan realitas peristiwa dan dinamika politik untuk konsumsi publik, melainkan juga sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok tertentu untuk menggalang massa pendukung.

Pemilukada Sulsel 2013 misalnya yang ramai diperbincangkan masyarakat dan tidak luput dari sorotan berbagai media lokal. Dengan meningkatnya suhu politik pada momen Pilgub tersebut, intensitas kompetisi antar media pun semakin meningkat. Narasi pertarungan elit politik lokal dalam perhelatan demokrasi misalnya ditunjukkan pada tiga tema besar berita tentang Pilgub Sulsel 2013, antara lain mengetengahkan isu seputar kampanye politik, rivalitas antarkandidat, counter politik dan polarisasi konstituen.

Contoh kasus misalnya pada konstruksi pemberitaan Koran Harian Rakyat Sulsel yang cenderung berpihak pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur petahana (*incumbent*), yang menyingkirkan paket Ilham Arif Sirajuddin-Azis Qahhar Mudzakkar, dan paket Rudyanto Aspa-Andi Nawir Pasinring sebagai pesaingnya (*challenger*). Koran Tribun Timur di pihak yang lain, lebih cenderung memperkuat eksistensi paket Ilham Arif Sirajuddin-Azis Kahar Mudzakkar dalam narasi pemberitaannya dan Koran Sindo menampilkan

isu isu politik dari ketiga kandidat pasangan calon dalam narasi pemberitaannya.

Ketiga media lokal tersebut sebagai objek penelitian ini, sangat rentan karena posisi dan peran strategisnya di arena diskursus politik Pemilukada khususnya pada Pilgub Sulsel 2013. Peran strategis yang dimaksud karena media umumnya mampu mengonstruksi realitas politik di ruang publik, realitas konstruksi media yang tidak mungkin netral dan bebas nilai, tetapi selalu memuat kepentingan atau memihak pada kelompok tertentu. Dalam kaitan ini, elit politik menjadikan media sebagai instrumen politik atau “elemen taktis” dalam istilah Foucault—untuk meraih simpati atau dukungan massa.

Berangkat dari latar permasalahan tersebut, peneliti bermaksud menganalisa proses hegemoni politik dalam diskursus Pemilukada Sulawesi Selatan, khususnya pemilihan Gubernur tahun 2013. Hegemoni politik diasumsikan menyebar di berbagai konteks sosialnya (situasional, institusional, dan sosial). Berdasarkan kerangka relasi diskursif tersebut, maka formulasi judul tesis yang diketengahkan terkait pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 adalah: “HEGEMONI POLITIK DALAM DISKURSUS PEMILUKADA SULSEL 2013”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada uraian latar belakang, maka masalah pokok yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi teks berita Pemilukada Sulsel 2013 dan praktik ekonomi politik media Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur & Koran Sindo ?
2. Bagaimana kecenderungan konstruksi media terhadap perilaku pemilih pada Pemilukada Sulsel 2013 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait fokus penelitian untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi teks berita Pemilukada Sulsel 2013 dan praktik diskursus ekonomi politik media Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran Sindo.
2. Menganalisis kecenderungan konstruksi media terhadap perilaku pemilih pada Pemilukada Sulsel 2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan ilmiah dan akademis dalam rangka pengembangan studi sosiologi khususnya upaya mengintegrasikan teori-teori kritis dalam ilmu sosiologi politik dan komunikasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh pihak yang berkompeten, praktisi dan pemerhati media,

dan masyarakat guna membangun kesadaran kritis dalam membaca realitas sosial media massa.

1.5. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang telah di ajukan, untuk menghindari multiinterpretasi dan ketidakjelasan konsep dan objek penelitian. Berikut dijabarkan konsep judul dan objek penelitian secara operasional yang berkorelasi tujuan dan fokus penelitian.

1. CDA (Critical Discourse Analysis)

Penulis menggunakan metodologi Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough karena metode penelitian yang berparadigma kritis dan konstruktivis kualitatif dengan tiga tahap model analisis yaitu tahap pertama, peneliti menfokuskan menganalisis data secara tekstual pada level mikro (Data Tekstual). Tahap kedua, peneliti menfokuskan menganalisis data wawancara pada level meso (Praktik Ekonomi Politik Media) dengan melihat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pola rutinitas media. Tahap ketiga, pada level makro peneliti menganalisis data tekstual terkait kecenderungan konstruksi media terhadap perilaku pemilih (Konteks Sosial) pada Pilgub Sulsel 2013. Hal tersebut yang membedakan dengan analisis konten yang hanya berfokus pada analisis tekstual dan cenderung kuantitatif.

2. Koran Harian Rakyat Sulsel

Koran Harian Rakyat Sulsel adalah salah satu media lokal yang menjadi objek penelitian ini, penulis memilih Koran lokal ini dengan membedakan beberapa alasan, yaitu :

- a. Kecendrungan pada pemberita wacana politik dengan slogan “The Political News Reference”.
- b. Koran Harian Rakyat Sulsel merupakan bagian dari Fajar Group yang di pimpin oleh Subhan Alwi Hamu.
- c. Pada Pilgub 2013, diketahui media ini sangat intens dalam memberitakan salah satu pasangan calon.

3. Koran Tribun Timur

Koran Tribun Timur adalah salah satu media lokal yang menjadi objek penelitian ini, penulis memilih surat kabar lokal ini dengan membedakan beberapa alasan, yaitu :

- a. Koran Tribun Timur merupakan generasi baru koran daerah Kompas setelah generasi pertama Koran Tribun Timur lahir (Koran Tribun Kaltim) dan kemudian Koran Tribun Timur Makassar yang di pimpin oleh H. Maddo Pammusu.
- b. Koran Tribun Timur merupakan perusahaan yang sasaran distribusi antar kota dan daerah.
- c. Pada Pilgub 2013, diketahui media ini sangat intens dalam memberitakan salah satu pasangan calon.

4. Koran Sindo

Koran Sindo adalah salah satu media lokal yang menjadi objek penelitian ini, penulis memilih surat kabar lokal ini dengan membedakan beberapa alasan, yaitu :

- a. Peneliti mengidentifikasi bahwa Koran Sindo dalam publikasinya bernarasi netral dan independen.
- b. Koran Sindo merupakan salah satu Koran Lokal di Makassar dengan daya jangkau dari kota hingga ke daerah.
- c. Koran Sindo juga sangat intens dalam publikasi wacana politik Pemilukada Sulsel 2013.
- d. Peneliti memilih Koran Sindo sebagai pembanding wacana politik Koran Harian Rakyat Sulsel dan Koran Tribun Timur guna menghindari subjektifitas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Hegemoni Dan Kekuasaan

A. Hegemoni Politik

Hegemoni merupakan sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci 1891-1937, dalam buku *Selection from Prison Notebooks*. Antonio Gramsci adalah ahli filsafat politik terkemuka Italia pada abad ke 20, dan dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx (Storey, 2003: 172).

Gramsci dengan gagasannya yang cemerlang tentang hegemoni, banyak dipengaruhi oleh filsafat hukum Hegel, dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma basis-suprastruktur (Eni Maryani, 2011: 28-30). Teori-teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional (Yoce Aliah, 2009: 104-109).

Konsep hegemoni bertujuan untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa memiliki arti luas dan tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide ide yang didiktekan oleh kelompok

dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai suatu kewajaran.

Negara Indonesia pada masa orde baru (*Era Otoritarianisme*), posisi media massa mendapat kontrol yang begitu ketat dari penguasa dan menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaannya dengan melakukan *hegemoni*. Pemutaran film peristiwa G30S/PKI secara berkala yang penuh rekayasa dan pembelokan sejarah, sampai saat ini masih menyisakan pengaruh bagi sebagian masyarakat di Indonesia sehingga sampai sekarang kita mengenal organisasi yang menamakan dirinya front anti komunis yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri.

Ketika memasuki era reformasi (*Liberal Responsibility*) di mana media massa menikmati kebebasannya dan tidak lagi menjadi corong bagi penguasa, akan tetapi tidak berarti dengan sertamerta media massa bebas dari kontrol pihak tertentu. Meski tidak lagi menjadi corong penguasa akan tetapi media massa tidak pernah lepas dari intervensi sang pemilik modal yang dikuasai oleh segelintir orang yang notabene memiliki beragam kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik dan ideologi tertentu.

Bagi Gramsci, proses hegemoni terjadi apabila cara hidup, cara berfikir dan pandangan pemikiran masyarakat bawah terutama kaum proletar telah meniru dan menerima cara berfikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Dengan

kata lain, jika ideologi dari golongan yang mendominasi telah diambil alih secara sukarela oleh yang didominasi (Roger Simon, 2004: xix).

Situasi politik pemilihan kepala daerah di Sulsel pada Pilgub 2013, telah menjadi bukti dari konsep ini, dominasi kekuasaan masing masing kandidat telah menggunakan instrumen media lokal untuk mempertahankan kekuasaannya. Eksploitasi terhadap surat kabar lokal dengan ideologi politik kandidat tertentu mengisyaratkan bahwa kebebasan pers kembali pada masa orde baru, dimana media dikontrol oleh penguasa dan pengusaha.

Gramsci berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan dan hegemoni. Jika yang pertama menggunakan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi atau nilai-nilai tertentu, maka yang terakhir meliputi perluasan dan pelestarian kepatuhan aktif dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik (Eriyanto, 2008: 103).

Hegemoni menunjukkan kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni merupakan upaya

menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Nezar & Andi dalam Saiful, 2000: 121).

Hegemoni berarti situasi faksi kelas yang berkuasa menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinatnya dengan cara mengombinasikan kekuatan dengan persetujuan sadar. Dengan kata lain, kombinasi antara paksaan dan persetujuan sadar, yang masing-masing saling mengimbangi secara resiprokal dimana paksaan tidak mendominasi persetujuan sadar secara berlebihan. Yang diupayakan justru adalah agar paksaan bisa tampak seolah didasarkan pada persetujuan mayoritas orang, misalnya diekspresikan oleh organ-organ opini publik atau surat kabar (Chris Barker, 2005: 79).

Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan, mengembangkan diri melalui kepatuhan pada korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Proses ini terjadi dan berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan (Yudi Latif, 1997: 294).

Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berfikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah.

Ada suatu nilai atau konsensus yang dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara pandang atau wacana lain dianggap sebagai tidak benar.

Hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat.

B. Teori Kekuasaan Michelt Foucault

Michelt Foucault (1926-1984) adalah salah satu tokoh postrukturalis dan posmodernis terkemuka di Prancis. Foucault juga dikenal sebagai ahli filsafat, sejarah dan psikologi dan sebagai intelektual yang cukup produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkannya sebagai buku. Inti pemikiran Foucault adalah relasi kuasa dan pengetahuan, wacana, diskontinuitas dan epistem (Yoce Aliah, 2014: 113).

Salah satu yang menarik dari konsep Foucault adalah relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Foucault mendefinisikan kuasa agak berbeda dengan para ahli yang lain. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa, menurut Foucault tidak dimiliki tetapi praktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain (Eriyanto, 2008: 65).

Menurut Foucault (1980), kekuasaan terdistribusi dalam relasi-relasi sosial dan tidak dapat direduksi ke dalam bentuk-bentuk dan penentu-penentu ekonomik yang terpusat atau kepada karakter legalnya.

Kekuasaan membentuk sebuah kapiler yang terajut dalam serat-serat tatanan sosial. Lebih jauh lagi kekuasaan tidak semata represif, tetapi juga produktif, kekuasaan memunculkan subjek-subjek. Kekuasaan berperan melahirkan kekuatan, membuatnya tumbuh dan memberinya tatanan, kekuasaan bukan sesuatu yang selalu menghambat kekuatan, menundukkannya atau menghancurkannya (Chris Barker, 2005: 108).

Menurut Foucault, kaum Marxian lebih cenderung memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang setimbang dengan komoditas sehingga bisa dialih-hakkan (diberikan, dijual, diambil, dirampas dan sebagainya). Pemahaman seperti itu disebut Foucault dengan istilah “ekonomisme” dalam teori kekuasaan. Menurut Foucault seseorang akan mengalami kegagalan apabila memahami kekuasaan dengan menempatkannya sebagai suatu benda sebagaimana paham ekonomisme. Pemahaman tersebut mengabaikan realitas bahwa kekuasaan juga merupakan proses yang melibatkan agensi, wacana, dan praktik yang mengalir dari bawah ke atas (Eni Maryani, 2011: 57).

Konsep kekuasaan Foucault menekankan pada bentuk tindakan atau strategi dalam menghadapi hubungan yang tidak seimbang. Bentuk strategi itu diistilahkan Foucault sebagai “teknologi politis”, adakalanya dengan mendukung, menyerah dan patuh, menentang dan banyak lagi lainnya. Karena kekuasaan adalah sebuah tindakan strategis maka bisa dipahami kalau ia selalu hadir dalam setiap hubungan, terutama yang dicirikan oleh ketidakseimbangan sebagai produk kekuasaan. Lebih jauh

lagi Foucault memastikan bahwa dalam setiap hubungan ada kuasa yang kemudian selalu punya potensi untuk melakukan resistensi. Di mana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi (Eni Maryani, 2011: 58).

Selain melihat potensi resistensi di balik relasi-relasi kuasa, Foucault senantiasa mengaitkan kuasa dan pengetahuan. Kekuasaan selalu terakumulasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Hampir tidak mungkin bagi kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi bahwa untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan (Eriyanto, 2008: 66).

Kekuasaan disusun dan dimapankan oleh pengetahuan dan wacana tertentu. Kebenaran bagi Foucault tidak dipahami sebagai suatu yang datang begitu saja melainkan kebenaran diproduksi setiap kekuasaan. Intinya menurut Foucault, kekuasaan dan pengetahuan secara langsung saling memengaruhi, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ada konstitusi korelatif dari bidang pengetahuannya (Yoce Aliah, 2014: 116).

Semua tempat berlangsungnya kekuasaan menjadi tempat pembentukan dan perkembangan pengetahuan. Melalui wacana, kehendak mengetahui terumus dalam pengetahuan. Maka kebenaran

sangat ditentukan oleh perspektif yang diambil. Masalahnya bukan untuk menentukan apakah produksi wacana dan efek kekuasaan membawa kebenaran atau kebohongan, tetapi untuk mengungkap keingintahuan sebagai penopang dan instrumen kekuasaan (Haryatmoko, 2010: 8 - 12).

Perspektif relasi kuasa dan pengetahuan tersebut, maka kekuasaan berkecenderungan untuk menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan tindakan represif, tetapi menurut Foucault melalui normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin, dan dengan cara positif dan produktif. Dalam konteks ini, Foucault menolak pandangan yang menyatakan kekuasaan sebagai subjek yang berkuasa (raja, negara, pemerintah, ayah, laki-laki dan seterusnya), dan subjek itu dianggap melarang, membatasi, atau menindas (Eriyanto, 2008: 67).

Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial, memproduksi bentuk kategorisasi perilaku seperti baik dan buruk sebagai bentuk pengendalian perilaku. Khalayak ditundukkan dengan wacana dan mekanisme berupa prosedur aturan dan tata cara. Bukan dengan cara kontrol secara langsung dan fisik. Masalah ini diuraikan dalam bukunya *Discipline and Punish* (Yoce Aliah, 2014: 116).

2.2. Konsep Media sebagai Senjata Politik Dan Ekonomi Politik Media

A. Konsep Maurice Duverger

Duverger, dalam bukunya (*The Study Of Politics*) pada tahun 1917, melalui pemikiran Marxisme bahwa Duverger mengupas secara tajam tentang antagonisme politik, konflik dan integrasi sosial untuk memperjelas kontradiksi-kontradiksi antara Marxisme dan demokrasi liberal. Duverger mengatakan bahwa antagonisme politik atau konflik dan integrasi sosial merupakan salah satu aspek terpenting dalam politik. Oleh karena itu untuk menciptakan integrasi sosial yang berkeadilan justru harus menghapuskan setiap jenis penghisapan, dominasi dan penindasan maka antagonisme politik perlu diusahakan untuk dikurangi atau bahkan dilenyapkan sehingga tercipta suasana sosial yang integratif , demokrasi dan kondisi masyarakat yang harmoni.

Bagi Duverger senjata pertempuran politik, dalam perjuangannya memperebutkan kekuasaan dengan memanfaatkan media informasi sebagai senjata politik. Ketika massa penduduk mencapai tingkat pendidikan tertentu dan mencapai akses kepada informasi, media dimanfaatkan untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi yang mampu di gunakan oleh negara, oleh organisasi organisasi kapitalistik atau oleh partai dan gerakan rakyat. Dalam arti ini kekuatannya terikat pada kekuasaan, uang, jumlah, akan tetapi mereka juga mempunyai kekuatan sendiri (Duverger, 2002: 267).

Era otoritarian adalah masa dimana media informasi berada dalam kontrol negara, yang berfungsi untuk menyebarkan propaganda negara yang menjadi sumber kekuasaannya yang utama, propaganda ini cenderung mengamankan dukungan penuh dari pemerintah. Media pada era ini, tidak berorientasi pada perjuangan kelas atau kategori sosial yang meliputi bangsa, akan tetapi pada penyatuan negara. Sedangkan pada era demokrasi tidak semua media informasi di kontrol oleh negara. Pluralisme media adalah unsur di dalam pluralisme rezim, bersama dengan pluralisme dalam partai politik. Pluralisme dalam partai politik akan menjadi ilusi dan hanya formalistis bilamana tidak disertai oleh pluralisme di dalam media informasi (Duverger, 2002: 269).

Posisi media informasi sebagai senjata politik merupakan salah satu strategi yang digunakan tanpa kekerasan fisik yang berfungsi sebagai penyebar pengetahuan dan informasi untuk mempengaruhi khalayak menjalin integrasi sosial. Media sering kali digunakan oleh negara, organisasi-organisasi kapitalistik, partai dan rakyat. Kekuatan media terikat kepada kekuasaan, uang, akan tetapi mereka juga mempunyai kekuatan sendiri. Pers sebagai senjata politik selalu diakui karena memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat hingga akhirnya dilukiskan sebagai Fourth Estate kekuatan keempat, untuk menunjukkan pentingnya secara politik. Media sebagai kekuatan keempat meliputi pers radio, pers visual dan surat kabar sebagai alat untuk menyebarkan berita yang menjadi hasil teknologi modern (Faulks, 2010: 236, Duverger, 2002: 268)

B. Teori Ekonomi Politik Media

Vincent Mosco dalam bukunya "*The Political Economy of Communication*" secara tersirat menyebutkan bahwa Posmodernitas dengan ekonomi politik tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Hal tersebut terbukti dari beberapa teori dalam buku Mosco yang mengupas tentang adanya keterkaitan hal tersebut diatas. Diantara teori tersebut adalah komodifikasi, spasialisasi dan strukturalisasi.

Komodifikasi diartikan Karl Marx sebagai transformasi penggunaan nilai yang dirubah ke dalam nilai yang lain. Dalam artian siapa saja yang memulai kapital dengan mendeskripsikan sebuah komoditi maka ia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Spasialisasi ialah sebuah sistem konsentrasi yang memusat. Dijelaskan jika kekuasaan tersebut memusat, maka akan terjadi hegemoni. Hegemoni itu sendiri dapat diartikan sebagai globalisasi yang terjadi karena adanya konsentrasi media. Strukturalisasi yang didalamnya menggambarkan tentang keunggulan untuk memberi perubahan sosial sebagai proses yang sangat jelas mendeskripsikan bagaimana sebuah struktur diproduksi dan diproduksi ulang oleh manusia yang berperan sebagai pelaku dalam struktur ini (Mosco, 1996:140).

Ekonomi politik media adalah (Mosco, 1996 dalam Rosniar, 2013) studi tentang hubungan sosial khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber sumber produksi, distribusi, dan konsumsi. Mosco berpendapat bahwa kajian ekonomi politik media

berangkat dari konsep atau pengertian yang membedakan pengertian ekonomi politik menjadi dua macam, pengertian sempit dan pengertian luas, kajian ekonomi politik media berarti kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Proses kontrol ini secara luas bersifat politik karena dalam proses tersebut melibatkan pengorganisasian sosial hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. Sedangkan pengertian sempit pada kajian ini adalah berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya.

Perspektif ekonomi politik media melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Dengan kata lain bahwa media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Proses dominasi ini menunjukkan adanya penyebaran yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat bersangkutan. Sehingga berimplikasi pada realitas yang di konstruksi cenderung bersifat bias dan terdistorsi (Rosniar, 2015:45).

2.3. Konsep Aktor Politik, Struktur Sosial Dan Dominasi Kekuasaan

A. Aktor Politik

Aktor politik adalah orang atau individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, Menurut McNair bahwa media juga sebagai aktor politik. aktor politik yang dimaksud adalah institusi media dan orang-orang yang bekerja di dalamnya (McNair, 2011: 5), berikut penjelasan beberapa aktor politik tersebut :

1. Partai Politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedang cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.
2. Kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan yang sama dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan keinginan-keinginan tersebut (Bambang & Sugianto, 2007: 176). Menurut Mariam Budiarjo bahwa kelompok kepentingan bersifat longgar dari partai politik, kelompok ini tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen. Menganggap bahwa badan itu atau Partai politik sudah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah yang lebih spesifik, sehingga kelompok ini fokus pada masalah tertentu saja.

3. Kelompok penekan (*pressure group*) biasanya terdiri sekumpulan orang pemikir, mereka terbiasa mengadakan diskusi mengevaluasi keadaan negara, mengkritiks jalannya pemerintahan, menuangkan gagasan-gagasan perbaikan keadaan, kemudian hasil pemikirannya yang biasanya berupa kritik-kritik tajam, sering disampaikan kepada pemerintah, atau lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Media adalah sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak, media dapat memainkan berbagai peran politik, di antaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Menurut Cook (2000: 4) bahwa para wartawan telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik.

B. Struktur Sosial

Struktur Sosial tidak hanya dibentuk oleh Aktor namun juga membentuk Aktor. Struktur sosial itu sendiri berarti tatanan sosial yang terdapat dalam masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Struktur sosial yaitu keseluruhan kompleksitas yang berbasis kelas, ras, etnisitas, gender. Struktur sosial semacam inilah yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam masyarakat yang pada gilirannya membentuk struktur dan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor politik.

Menurut Soekanto (1992), struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok, yang meliputi: kelompok sosial, kebudayaan,

lembaga sosial, stratifikasi sosial. kekuasaan dan wewenang. Berkaitan dengan konsep tersebut stratifikasi sosial dapat diartikan adanya perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kelas sosial dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu. Menurut Gaetano Mosca (1858-1941), semua masyarakat dapat dibagi kedalam kelas atau kelompok penguasa dan kelas yang dikuasai.

1. Kelas Penguasa yaitu memiliki jumlah yang lebih sedikit, namun ia dapat memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya, tentu dari kekuasaannya itu.
2. Kelas yang dikuasai yaitu memiliki Jumlah dari kelas yang dikuasai ini lebih besar, namun ia justru lebih berposisi pada “yang diatur dan dikontrol,” dan pengatur pun pengontrolnya tak lain adalah kelas pertama, penguasa. Dilihat dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang yang menduduki posisi sebagai elite penguasa tentu mempunyai kemampuan lebih dari pada massa yang dikuasai itu.

Selanjutnya Mosca (1858-1941) membagi empat faktor yang menjadi dasar sosial kekuasaan suatu kelas, sebagai berikut :

1. Pengatahuan adalah hal yang tak bisa diabaikan, dan ia pun menjadi salah satu faktor dasar dari sosial kekuasaan. pengetahuan adalah sumber kekuasaan yang bisa diartikan sebagai pemilikan beberapa tehnik, keunggulan pengetahuan adat dan pengetahuan moral,

keagamaan. Semua keunggulan itu dapat juga menjadi pengesah dari posisi sebagai kelas penguasa.

2. Kelahiran memiliki definisi sebagai status yang diwarisi memberi akses pada lingkaran kelas penguasa, masyarakat hierarkis tertutup, aristokrat turun-temurun, termasuk pada lingkaran kelas penguasa pada masyarakat yang demokratis sekalipun.
3. Kekayaan telah menjadi alat untuk memasuki kelas penguasa baik di dalam sistem pemerintahan klasik seperti kerajaan, monarki ataupun sistem pemerintahan modern seperti nasionalis, kapitalis, sosialis.
4. Kemampuan Militer merupakan sumber berharga ketika kondisi sebuah negara dalam bahaya, penuh konflik, berperang. Siapa yang memiliki pasukan banyak, strategi militer dan peralatan senjata canggih tentu akan lebih mendapatkan kuasa.

C. Konsep Dominasi Kekuasaan

Menurut Mosca (1858-1941) dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil (kelompok Minoritas), menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar (Kelompok Mayoritas), diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama (Kelompok Minoritas).

Pandangan tersebut bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas

pertama yang menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara- cara tertentu (Sastroatmodjo, 1995).

Kedua kelas tersebut memperlihatkan dominasi kelompok minoritas atas kelompok mayoritas. Kehadiran teori kritis warisan Karl Marx bertujuan menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan atau dalam hal ini emansipatoris. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik atau ekonomi yang ada, yang cenderung tidak kondusif bagi pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan. Tujuan teori adalah membebaskan manusia dari seluruh bentuk dominasi (Marcuse, 1964 : 257).

Bentuk dominasi yang berkembang di masyarakat hadir dalam rupa yang sangat variatif. Dominasi dapat berupa sistem birokrasi, hukum pasar, bentuk-bentuk kebudayaan yang memaksakan, ilmu pengetahuan, ideologi, bahkan filsafat. Dominasi itu disadari atau tidak disadari telah melahirkan disorientasi nilai, penyimpangan eksistensi, aliansi, budaya tunggal yang mematikan budaya pluralisme, memusnahkan budaya minoritas. Singkatnya dominasi meletakkan manusia pada titik nadir terendah dalam nilai-nilai kemanusiaan.

Dominasi adalah suatu kekuasaan yang paling dominan, berasal dari luar diri manusia, sangat mempengaruhi dan turut mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan berpikir serta tingkah laku manusia, sementara manusia menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh. Pemahaman terhadap arti dominasi dan jalan keluar yang ditempuh dari perspektif aliran kritis dapat membantu masyarakat untuk mempertajam kaidah kemanusiaannya yang lebih dinamis dan sejauh pembangunan di Indonesia menuju masyarakat industrial,

Menurut Marx, dominasi ditemukan dalam bentuk kekuasaan antara pemilik modal di satu sisi dan kaum buruh di sisi yang lain, melalui praktik hubungan produksi. Masing-masing cara produksi di cirikan oleh hubungan produksi yang esensinya bersifat eksploitatif, yakni antara para produsen surplus ekonomi dan kelompok pekerja. Surplus ekonomi tersebut menjadikan mereka kelompok borjuis dan kelompok pekerja proletar semakin terpojokkan.

Menurut Giddens (1986) Marx mendeskripsikan ketika kelas dominan dalam masyarakat mengembangkan dan mengambil alih bentuk-bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasinya, maka saat yang sama kelas dominan tersebut mempunyai kendali atas sarana produksi intelektual, sehingga secara umum, gagasan pihak yang tidak mempunyai sarana produksi intelektual menjadi terakomodasi oleh sarana tersebut. Akhirnya, kesadaran dalam masyarakat ditentukan oleh kelas dominan. Lebih lanjut Marx menilai bahwa kesadaran itu berakar dari praksis manusia yang

pada gilirannya bersifat sosial. Inilah yang dikatakannya, bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi seseorang, tetapi kehidupan sosiallah yang menentukan kesadaran mereka (Ginting, 2012: 43-44).

Menurut Gramsci dominasi dari satu kelompok sosial atas yang lain, seperti kelas penguasa atas semua kelas lainnya. Gramsci mengklaim ide kelas penguasa dilihat sebagai norma, mereka dipandang sebagai ideologi universal, dianggap menguntungkan semua orang, namun sebenarnya hanya menguntungkan kelas penguasa (Ginting, 2012: 48).

2.4. Prilaku Pemilih

Studi tentang perilaku pemilih merupakan studi mengenai faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan akan mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol (Efriza, 2012: 480).

Sedangkan Prihatmoko (2005; 46) menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka “menunggu” sampai ada partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Menurut Firmanzah (2007, 89), ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni: Pertama, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini di masyarakat. Kedua, Faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh parpol dengan pandangan mereka masing masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan. Ketiga, kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang

melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula.

Terdapat tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini adalah sebagai berikut: Pertama, teori sosiologis, Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya (Afan Gaffar, 1992). Kedua, teori psikolog, keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Ketiga, teori sosial ekonomi, teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilih yang bisa membawa perubahan lebih baik.

Selanjutnya Nursal (2004), memperkenalkan konsep tentang pemasaran politik yaitu serangkaian aktivitas terencana, strategis tetapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah dukungan dalam berbagai bentuk, khususnya menjatuhkan pilihan pada kandidat tertentu.

Menurut O'Shaughnessy (2001) dalam Firmanzah (2007) marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan tools bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara. Kompetisi dalam memperebutkan suara pemilih, menuntut tim kampanye dari masing-masing kandidat kepala daerah untuk mendesain suatu formulasi khusus untuk menjaring suara pemilih sebanyak mungkin. Formulasi khusus tersebut berbentuk strategi komunikasi dan tahapan strategi pemasaran politik yang dijalankan untuk mengidentifikasi khalayak pemilih potensial yang sesuai dengan platform kandidat kepala daerah. Tahapan strategi pemasaran politik tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning.

Menurut Nursal (2004), segmentasi bertujuan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok khalayak, hal ini berguna mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesan-pesan komunikasi, melayani lebih baik, menganalisa perilaku konsumen, mendesain produk dan lain sebagainya. Para politisi perlu memahami konsep segmentasi karena berhadapan dengan para pemilih yang sangat heterogen, para politisi dapat memberi tawaran politik yang efektif bila mereka mengetahui karakter segmen yang menjadi sasaran.

Para pemilih juga dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku. Keempat segmen ini dikembangkan oleh Newman, (Adman Nursal, 2004: 126)

1. Segmen pemilih rasional, kelompok pemilih ini menfokuskan perhatian pada faktor isi dan kebijakan kontestan dan menentukan pilihan politiknya.
2. Segmen pemilih emosional, kelompok yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya, Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor persobalitas kandidat.
3. Segmen pemilih sosial, kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
4. Segmen pemilih situasional, kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dan menentukan pilihannya, segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politik jika terjadi kondisi-kondisi tertentu.

Menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku *politik explorer* (Efriza, 2012: 487), secara umum pemilih dikategorikan kelompok utama, yaitu:

1. Pemilih rasional kalkulatif, pemilihan tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.

2. Pemilih primordialisme, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap leluhur dan banyak berdomisili di perkampungan.
3. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integrasi dan visi misi yang dibawa kandidat.
4. Pemilih emosional, kelompok pemilih cenderung memutuskan pilihan politiknya karena perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya pilihan yang emosional. Biasanya kebanyakan pemilih dari mereka berasal dari kalangan hawa atau pemilih pemula.

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 *Conceptual Framework*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma, Pendekatan Dan Aplikasi Penelitian

A. Paradigma Penelitian

Analisis wacana dipahami sebagai studi bahasa yang menggunakan bahasa dalam teks untuk di analisis, tetapi bahasa yang di analisis disini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Analisis wacana menghubungkan dengan konteks sosial di luar teksnya jadi konteks berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Penelitian ini berparadigma kritis dan konstruktivis karena bahasa tidak lagi dipahami sebagai realitas objektif belaka, serta terpisah dari subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana dan relasi sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud tertentu dalam setiap wacana, individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial ada di masyarakat.

Paradigma ini menekankan pada konstalasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa bukan sebagai medium netral yang terletak diluar diri si pembaca, akan tetapi bahasa sebagai representasi yang berperan membentuk subjek tertentu, tema tema wacana tertentu, maupun strategi di dalamnya.

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari aspek paradigma, pendekatan penelitian terdiri atas dua perspektif, yakni pendekatan metodologi dan pendekatan keilmuan. Aspek metodologi menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Metode penelitian ini mengintegrasikan secara bersama-sama antara wacana dan konteks sosial politik. Fairclough menggunakan term wacana untuk menjelaskan bentuk pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih dari aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu (Eriyanto, 2008: 286). Dari aspek keilmuan, penelitian ini menggunakan pendekatan lintas disiplin atau sebuah upaya sintesis antara sosiologi politik dan sosiologi komunikasi dengan objek studi tentang dinamika politik dan media massa sebagai penghubungnya.

C. Aplikasi Penelitian

Metode analisis wacana kritis diaplikasikan untuk menganalisis objek penelitian tentang hegemoni politik dalam diskursus Pemilukada di Sulawesi Selatan. Hegemoni politik dalam konteks ini diasumsikan menyebar ke dalam berbagai level diskursus—mikro, meso, dan makro yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Multilevel diskursus yang dimaksud antara lain, Pertama, dimensi teks level mikro, menganalisis konstruksi berita Pilgub Sulsel 2013 khususnya pada Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran Sindo. Kedua, praktik diskursus level meso, menganalisis pola rutinitas dan dimensi ekonomi politik Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran

Sindo. Ketiga, konteks sosial politik level makro, menganalisis aspek situasional politik atau dimensi perilaku pemilih dalam diskursus Pemilukada Sulsel 2013.

3.2. Setting Penelitian

Setting penelitian ini terdiri dari waktu, lokasi, situasi, objek dan subjek penelitian. Setting waktu ditetapkan sejak observasi dilakukan pada awal bulan desember 2014 hingga penyusunan laporan penelitian akhir bulan desember 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni lokasi di mana objek dan subjek penelitian ini berkedudukan.

Objek penelitian adalah tiga media lokal yakni *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo*. Sedangkan subjek yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelibat wacana yaitu semua komponen struktural media sebagai objek penelitian, yang terlibat dalam proses produksi wacana dan pengamat politik sebagai representasi agen sosial yang diasumsikan netral dan progresif membangun wacana penyeimbang dalam arena diskursus dan masyarakat selaku konstituen yang pernah terlibat dalam Pilgub Sulsel 2013.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini berpijak pada kerangka CDA model Norman Fairlough, yang berfokus pada tiga unit analisis, 1) data tekstual berita Pemilukada Sulsel 2013 pada *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo*, 2) data tentang pola, rutinitas dan dimensi

ekonomi politik media *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo*, 3) data situasional politik dan perilaku pemilih dalam diskursus Pemilu Pilkada Sulsel 2013.

Ketiga data tersebut diperoleh melalui metode pengumpulan data sebagai berikut:

A. Dokumentasi Teks

Fokus mikro penelitian berupaya memperoleh data tekstual berita pada *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo* yang berkaitan dengan pemberitaan Pilgub Sulsel 2013. Metode yang digunakan adalah dokumentasi teks berita, yaitu proses untuk mengumpulkan berita dalam bentuk hard file (berita koran) atau soft file (berita online) yang dipublikasi *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo* terkait diskursus Pilgub Sulsel 2013. Berita yang didokumentasikan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan *critical linguistic* dengan cara mendeskripsikan dimensi tekstual pemberitaan; representasi, relasi, dan identitas.

B. Wawancara Mendalam dan Pengamatan

Fokus meso mengantarai atau menjadi penghubung antara konteks sosial politik Pemilu Pilkada di satu sisi, dan praktik diskursus media atau pola, rutinitas, dimensi ekonomi politik media *Harian Rakyat Sulsel*, *Tribun Timur* dan *Koran Sindo* di sisi lain. Sebab itu strategi pengumpulan data yang relevan digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan.

Metode wawancara dan pengamatan diharapkan terjadi interaksi dan komunikasi antara peneliti dan informan sehingga makna tentang praktik

diskursus media akan terungkap, baik menurut perspektif pengetahuan dan pemahaman perspektif wartawan serta redaktur politik *Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur* dan *Koran Sindo*.

Selain melakukan wawancara, pada tahap ini perlu suatu pengamatan dalam mekanisme kerja *Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur* dan *Koran Sindo*, yakni mengamati proses produksi berita, rapat redaksi dan pembagian tugas wartawan, sampai penulisan laporan hasil peliputan peristiwa Pemilu 2013 di ruang redaksi *Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur* dan *Koran Sindo*.

C. Studi Pustaka Dan Penelusuran Literatur

Fokus makro bertujuan memperoleh data tentang konteks sosial politik–situasional, institusional dan sosial–Pemilu 2013. Metode yang relevan digunakan untuk memperoleh data-data tersebut adalah studi pustaka atau penelusuran literatur yang bertujuan mengungkap realitas sistem politik dan segi perilaku pemilih yang ditimbulkan diskursus Pemilu 2013.

Tabel 2.1 Metode Pengumpulan Data

Unit Masalah	Level Analisis	Pengumpulan Data
Teks	Mikro	<i>Dokumentasi</i>
Praktik diskursus	Meso	1. <i>Pengamatan</i> 2. <i>Wawancara Mendalam</i> 3. <i>Penelusuran Literatur</i>
Konteks Sosial	Makro	1. <i>Wawancara Mendalam</i> 2. <i>Studi Pustaka</i> 3. <i>Penelusuran Literatur</i>

3.4. Metode Analisis Data

Analisis wacana kritis adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Kerangka analisis wacana kritis model Norman Fairclough (Eriyanto, 2008: 326-327) akan dielaborasi dengan fokus masalah dan temuan data-data penelitian. Berikut adalah uraian multilevel analisis terhadap data-data penelitian.

A. Deskripsi

Data mikro yang dianalisis pada tahap ini adalah teks berita Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran Sindo. Menguraikan isi atau menganalisis secara deskriptif teks/berita ketiga media tersebut. Berita dalam konteks ini tidak dihubungkan dengan aspek lain, melainkan menganalisis bagaimana hubungan antara objek–representasi, relasi, dan identitas aktor politik Pemilukada Sulsel 2013, yang didefinisikan melalui bahasa yang digunakan oleh wartawan pada tiga media lokal tersebut serta dengan melakukan perbandingan antara ketiga media tersebut.

B. Interpretasi

Analisis data pada level meso menggambarkan praktik diskursus dalam ruang redaksi. Dengan kata lain menginterpretasi data-data tentang pola produksi dan rutinitas media secara kolektif antara wartawan, redaktur dan elemen struktural media, serta dimensi ekonomi politik media Harian Rakyat Sulsel, Tribun Timur dan Koran Sindo yang berpengaruh dalam konstruksi berita politik Pemilukada Sulsel 2013.

C. Menjelaskan

Level analisis pada tahap ini bersifat makro dan kontekstual yang terbagi ke dalam dimensi situasional, institusional sosial. Fokus yang akan dianalisis adalah data-data terkait konteks sosial politik atau aspek situasional politik hingga penjelasan tentang dimensi perilaku pemilih dalam diskursus Pemilu pada Sulsel 2013.

Tabel 2.2 Analisis Data

TINGKATAN	ANALISIS DATA
Teks	Deskripsi
Praktik Diskursus Di Ruang Redaksional	Interpretasi
Sociocultural Practice	Explainasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil Koran Harian Rakyat Sulsel

A. Sejarah Berdirinya Koran Harian Rakyat Sulsel

Koran *Harian Rakyat Sulsel* resmi terbit perdana pada 7 Mei 2012. Harian ini diterbitkan PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia sesuai Akta Notaris Abdul Muin Marsidi SH Nomor 15 Akta tertanggal 30 April 2012. Penerbitan Harian Rakyat Sulsel bertujuan guna memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat terkait isu-isu politik, pemerintahan, ekonomi, olahraga, dan berita umum lainnya. Namun segmentasi utamanya adalah isu politik, khususnya dinamika politik lokal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

B. Visi Dan Misi

Visi Koran *Harian Rakyat Sulsel* adalah menjadi referensi dunia politik di Sulawesi Selatan khususnya dan kawasan timur Indonesia pada umumnya. *Harian Rakyat Sulsel* menjadi barometer bagi pelaku-pelaku politik di kawasan ini.

Sedangkan misi Koran *Harian Rakyat Sulsel* adalah masing-masing sebagai berikut: mengantisipasi dan merespons dinamika dunia politik, khususnya pasar pembaca, secara profesional dan berimbang dengan menyajikan serta menyebarluaskan informasi menarik, bermanfaat, dan

mudah diserap serta menjunjung etika dan kesopanan. Memberikan pemenuhan hak dasar dan keingintahuan masyarakat di kawasan timur Indonesia, utamanya di Sulawesi Selatan dalam hal politik. Memberikan gambaran umum peta perpolitikan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia kepada para pelaku dan pemerhati politik. Menjadi media pembelajaran tentang politik untuk pemilih pemula.

C. Struktur Organisasi Koran Harian Rakyat Sulsel

1) Struktur Redaksional

Komisaris Utama	: Subhan Alwi Hamu
Komisaris	: Adnan Purichta Ichsan YL
Komisaris	: Saldy Nurjaffia Ichsan YL
Komisaris	: H. Sahel Abdullah
Pemimpin Redaksi	: Subhan Yusuf
Penanggung Jawab	
Direktur	: Buyung Maksum
Wakil Direktur	: Arifuddin Saeni
Wakil Direktur	: Imran Umar
Wakil Direktur	: Husain Djunaid
Wakil Direktur	: Daswar M. Rewo
Manajer Iklan	: Muh. Asri
Manajer Sirkulasi	: Daswar M. Rewo
Manajer keuangan	: Andi Nurcaya, SE
Manajer IT/Portal/Litbang	: Ruslan

Sekretaris Perusahaan	: Indah Suciati Nur
Kepala Redaksi	
Direktur Pemberitaan	: Buyung Maksum
Wakil Direktur Pemberitaan	: Al Ulla Azhar
Dewan Redaksi	: Subhan Yusuf
Dewan Redaksi	: Sonny Wakhyono
Redaktur Pelaksana	: Mulyadi
Redaktur Pelaksana	: Nasrudin
Koordinator Liputan	: Azis Kuba
Staf Redaksi	: Abdullah Ratingan, Ahmad Faisal Tahir, Sulaiman AK, Dewi Yuliani, Suherman Madani, Ahmad Sabir, Andi Rannu.
Redaktur Foto	: MD. Fajar
Sekretaris Redaksi	: Elvira Heriani Yusuf
Reporter	: Muh. Luthfi, Ahmad Radi, Eka Kurniawan, Adil Patawai Anar, Ridwan Lallo, Al Qoriah, Dian Megawati, Trio Rimbawan.

2) Data Media

Penerbit	: PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia

Bahasa	: Indonesia (EYD)
Oplah Cetak	: ± 15.000 exemplar
Halaman	: 24 halaman (8 <i>Full Color</i> + 16 <i>Black White</i>).
Rubrikasi	: Utama, Blak-blakan, Politika, <i>Road to 1</i> , Pro Bisnis, Megapolitan, Metropolis, <i>On The Spot</i> , Sorot, Panggung Rakyat, <i>Goes to Campus</i> , Bibir Merah.
Proporsi Berita	: Politik 55%
	Ekonomi 15%
	Pendidikan 10%
	Olahraga 15%
	Lain-lain 5%

D. Peta Lokasi Koran Harian Rakyat Sulsel

Harian Rakyat Sulsel diterbitkan oleh PT. Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia, yang merupakan bagian dari Fajar Group dan dipimpin oleh Bapak Subhan Yusuf. Redaksi beralamat di Jl. Hertasning No. 54 Makassar, telp (0411) 880474, fax (0411) 880473, dan e-mail redaksi@rakyatsulsel.com, sedangkan website Harian Rakyat Sulsel ini beralamat di www.rakyatsulsel.com. Koran dengan 20 halaman ini

seharga Rp. 3000 dan harga langganannya Rp. 70.000/bulan. Berikut peta lokasi *Harian Rakyat Sulsel* di Makassar :

Gambar 3.1 Peta Lokasi Koran *Harian Rakyat Sulsel*

4.1.2. Profil Koran *Tribun Timur Makassar*

A. Sejarah Berdirinya Koran *Tribun Timur*

Koran *Tribun Timur* pertama kali terbit 9 Februari 2004, Kantor pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan wilayah edar meliputi dua provinsi utama di Sulawesi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Koran *Tribun Timur* merupakan salah satu koran daerah Kompas Gramedia yang dikelola PT. Indopersda Primamedia, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia. Untuk menerbitkan *Tribun Timur*, Kompas Gramedia bekerja sama dengan Bosowa Group, kelompok usaha nasional terkemuka yang berbasis di Makassar, kota utama pintu gerbang Indonesia Timur, Surat kabar *Tribun Timur* ini merupakan generasi baru koran daerah Kompas setelah generasi pertama *Tribun Timur* lahir di Kalimantan (*Tribun Kaltim*) dan kemudian *Tribun Timur*. Suksesnya *Tribun*

Kaltim, Tribun Timur membuat bendera Tribun berkibar, terlebih setelah Koran Tribun yang lainnya juga menuai sukses luar biasa, diantaranya Tribun Pekanbaru, Tribun Pontianak, Tribun Jabar.

Sejak pertama kali terbit, Koran *Tribun Timur* mendapat sambutan yang luar biasa dari pasar, *Koran Tribun Timur* sekarang menjadi Koran utama dan terkemuka di Makassar. Hingga pada usia ketiga, tahun 2007, Persda menobatkan *Tribun Timur* sebagai Koran terbaik dari sisi *financial perspective, business process, learn and growth, dan customer perspective*. Dari sisi sirkulasi dan readership, *Tribun Timur* juga tumbuh pesat, menempatkan Koran ini tidak hanya sebagai Koran terkemuka di Makassar tapi juga termasuk dalam jajaran Koran-koran dengan readership terbanyak secara nasional.

B. Struktur Organisasi Koran Tribun Timur

1) Struktur Redaksional

Pimpinan Perusahaan	: Ciptyantoro
Manajer iklan	: Risdianto Tunandi
Manajer Promosi	: Dedy Pakiding
Manajer Sirkulasi	: Abd Haris Suardi.
Pemimpin Umum	: H Maddo Pammusu
Wakil Pimpinan Umum	: Agus Nugroho
Pimpinan Redaksi	: Dahlan Dahi
Wakil Pimpinan Redaksi I	: Ronald Ngantung
Wakil pimpinan redaksi II	: Thamzil Thahir

Manajer Produksi : AS Kambie

Koordinator Liputan : Jumadi Mappanganro

Staf Redaksi : Herman Darmo, H Maddo Pammusu, Agus Nugroho, Uki M Kurdi, Dahlan Dahi, Ronald Ngantung, Thamzil Thahir, Insan Ikhlas Jalil, As Kambie, Ina Maharani Sri Istianingtyas, Jumadi Mappanganro, Muh Irham, Arif Fuddin Usman, Aqso Riandy Pananrang, Mansur Amirullah, Ridwan Putra, Imam Wahyudi, Muh Taufik, Alim bachri.

Reporter : Hasriani Latif, Moeh David, Aritanto, Suryana Anas, Edi Sumardi, Ilham mangelre, Hajrah, Ilham Mulyawan, Wa Ode Nurmin, Rasni Gani, Ilham Arsyam, Anita Kusuma Wardana, Mahyuddin, Hasan Basri, Mutmainnah Amri, Ardi

Muchlis, Risaldy Irawan, Sakina

Sudin, Hasyim Arfah.

Fotografer : Muhammad Abdiwan, Sanovra

2) Pembagian Kerja Struktur Organisasi Koran Tribun Timur

1. Bagian Redaksi

a. Koordinator Liputan

Mengkoordinasi dan mengawasi tugas peliputan dan penulisan, mengedit, dan mengoreksi hasil penulisan wartawan maupun menulis artikel agar peliputan berita sesuai dengan rapat perencanaan.

b. Manajer Produksi

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas design lay out, setting, image processing, serta pekerjaan percetakan lain, sehingga siap dicetak dengan standar kualitas dan pada waktu yang ditentukan.

c. Sekertaris Redaksi

Melakukan kegiatan-kegiatan kesekretariatan redaksi.

d. Redaktur

Membuat perencanaan harian atau mingguan mengatur mengkoordinasi dan mengawasi tugas peliputan dan penulisan, mengedit dan mengoreksi hasil penulisan wartawan maupun menulis artikel tertentu agar pemuatan berita sejalan dengan hasil rapat perencanaan.

e. Wartawan & Fotografer

Mencari dan menulis berita atau foto dengan cara melakukan peliputan, wawancara nara sumber, menerjemahkan, internet sesuai dengan penugasan dari redaktur.

f. Layout & Garfis

Melakukan penataan halaman sesuai dengan perencanaan.

g. Staf TI

Melakukan perencanaan, perbaikan, dan perawatan system jaringan computer.

2. Bagian Iklan

a. Manajer Iklan

Membuat rencana dan program kerja serta mengkoordinasi penjualan iklan untuk mencapai target.

b. Pemasaran Iklan

Melakukan penjualan space yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai target yang ditentukan.

c. Administrasi Iklan

Melakukan fungsi administrasi iklan.

d. Design Iklan

Membuat desain dan materi artistik mendukung penjualan iklan.

3. Bagian Sirkulasi

a. Manager Sirkulasi

Mengembangkan dan meningkatkan penjualan surat kabar yang meliputi perencanaan, penyusunan strategi pemasaran, koordibnasi pemasaran sampai memelihara hubungan baik dengan agen.

b. Pengendali Wilayah

Mengkoordinir penjualan dan distribusi produk penerbitan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan penjualan pemasaran yang ditetapkan.

c. Adminsitasi Sirkulasi

Melaksanakan fungsi administrasi iklan.

d. Ekspedisi

Melakukan kegiatan packaging dan pendistribusian surat kabar.

4. Bagian Pracetak & Percetakan

a. Manajer Pracetak & Percetakan

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi secara berkesinambungan proses produksi mulai dari perencanaan produksi, pracetak, cetak sampai dengan finishing untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya agar tercapai efisiensi dan efektivitas produksi sesuai kebijakan yang digariskan perusahaan.

b. Operator Pracetak

Melakukan kegiatan dan proses pracetak

c. Operator Cetak

Melakukan kegiatan dan proses cetak

d. Maintenance

Melakukan kegiatan perencanaan, perbaikan dan perawatan mekanik dan elektrik mesin-mesin pracetak dan cetak.

5. Bagian Keuangan

a. Manajer Keuangan

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi secara berkesinambungan proses di Bagian Keuangan sesuai kebijakan yang digariskan Perusahaan.

b. Accounting

Melakukan penyusunan, pemeriksaan, dan pelaporan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan.

c. Administrasi Keuangan

Melaksanakan fungsi administrasi keuangan.

d. Kasir

Menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan operasional perusahaan

C. Peta Lokasi Koran Tribun Timur

Koran ini diterbitkan oleh PT. Bosowa Media Grafika, yang dipimpin oleh Bapak H. Maddo Pammusu. Redaksi beralamat di Jl. Cendrawasi No. 430 Makassar 90134, telp (0411) 8115555 dan fax (0411) 8115522, serta e-mail tribuntimur@yahoo.com, sedangkan website koran ini beralamat di www.tribun-timur.com. Tribun Timur ini edisi terbit nomor 311 Tahun ke-9, dengan 36 halaman seharga Rp. 3000, sedangkan harga berlangganan Rp. 70.000/bulan. Berikut peta lokasi Koran *Tribun Timur* di Makassar :

Gambar 3.2 Peta Lokasi Koran Tribun Timur

4.1.3. Profil Koran Sindo

A. Sejarah Berdirinya Koran Sindo

Koran Sindo merupakan surat kabar dari PT Media Nusantara Informasi yang terbit perdana, pada 30 Juni 2005. PT Media Nusantara Informasi merupakan anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra,

(MNC Group). PT Media Nusantara Citra, merupakan perusahaan besar yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang media dan telekomunikasi, seperti RCTI, MNC TV, Global TV, Indovision, MNC Pictures dan Trijaya Network.

PT Media Nusantara Informasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang media massa yaitu menjalankan usaha penerbitan surat kabar harian atau koran yang biasa disebut Koran SINDO. PT Media Nusantara Informasi mulai berproduksi secara komersial pada 1 Juli 2005. Memiliki beberapa cabang yang disebut Biro di berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung kelancaran operasional secara nasional. Beberapa Biro yang tersebar di Indonesia antara lain Biro Jawa Barat di Bandung, Biro Jawa Tengah di Semarang, Biro Jawa Timur di Surabaya, Biro Sumatera Utara di Medan, Biro Sumatera Selatan di Palembang, dan Biro Sulawesi Selatan di Makassar.

B. Struktur Organisasi Koran Sindo Biro Makassar

1) Struktur Redaksional

Pemimpin Umum	: Sururi Alfaruq
Pimpinan Redaksi/ PJ	: Pung Purwanto
Wakil Pimpinan Redaksi	: Djaka Susila, Dwi Sasongo, Masirom
Redaktur Pelaksana	: Alex aji Saputra, Hanna Farhana

Wakil Redaktur Pelaksana : Abdul Hakim, Zen Teguh Tri Wibowo.

Kepala Biro Sul-Sel : Hermanto

Kepala Redaksi : Hatta Sujatmin

Koordinator Liputan : Umran La Umbu

Redaksi : Abdullah Nicolha, Agus Nyomba, Budi Santoso, Herni Amir, Kurniawan Eka Mulyana, Muh Syahrullah, Rahmi Djafar, sri S Syam, Supyan Umar, Suwarny Dammar, Yusdin Rukka.

Fotografer : Maman Sukirman, Adwit B Pramono, Taufik Sirajuddin.

Artistik : Juhamzah Sade (Koord), Andi Ashari Saputra, Izliyah, Kus Sapalena, Muhammad Rizal Z, Supriadi, Umar.

Gowa/Takalar : Baharuddin

3) Data Media

Penerbit : Media Nusantara Informasi

Bahasa : Indonesia (EYD)

Oplah Cetak : ± 15.000 exemplar

Proporsi Berita	: Politik	25%
	Ekonomi	20%
	Pendidikan	20%
	Olahraga	25%
	Lain-lain	10%

C. Peta Lokasi Koran Sindo Biro Makassar

Koran Sindo diterbitkan oleh PT. Media Nusantara Informasi yang dipimpin oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo. Alamat Biro Sulawesi Selatan di Jl. Haji Bau No. 10 Makassar, telp (0411) 854303, fax (0411) 854676 dan e-mail redaksi@seputar-indonesia.com, dengan alamat website Koran Sindo di www.sindonews.com. Koran Sindo edisi terbit nomor 2706 Tahun ke-8, dengan 28 halaman seharga Rp. 2000, sedanG harga berlangganan Rp. 50.000/bulan. Berikut peta lokasi Koran Sindo di Makassar :

Gambar 3.3 Peta Lokasi Koran Sindo Biro Makassar

4.2. Konstruksi Teks Berita Pemilukada Di Sulawesi Selatan Tahun 2013 Dan Praktik Diskursus Ekonomi Politik Media

4.2.1. Analisis Teks Berita Pemilukada Sulawesi Selatan 2013

Merujuk pada proses analisis wacana kritis, tahap pertama yang dilakukan adalah analisis pada tingkat mikro, yakni teks berita Koran *Harian Rakyat Sulsel*, Koran *Tribun Timur* dan Koran *Sindo*. Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, koherensi, dan kohesivitas atau bagaimana antar-kata antar-kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.

Isi berita dalam konteks ini dianalisis kemudian diuraikan secara deskriptif, dengan melihat realitas politik Pemilukada Sulsel 2013, yang dikonstruksi melalui bahasa yang digunakan oleh wartawan pada ketiga media lokal tersebut, kemudian teks/makna berita diperbandingkan dengan data praktik diskursus ekonomi politik media.

Berdasarkan temuan data observasi, ada perbedaan yang signifikan dalam konstruksi wacana pada Pemilukada Sulsel 2013, antara Koran *Harian Rakyat Sulsel*, Koran *Tribun Timur* dan Koran *Sindo*. Sebagai contoh konstruksi berita tentang rivalitas kandidat Gubernur Sulsel, antara Syahrul Yasin Limpo (Incumbent) dan Ilham Arif Sirajuddin. Penguatan isu atas kedua figur Cagub Sulawesi Selatan tersebut semakin diperkuat dengan publikasi kegiatan-kegiatan di daerah dalam rangka sosialisasi atau kampanye politik berbasis kepartaian.

Syl di satu pihak mengendarai partai Golkar berkampanye dengan tagline berbunyi "dont stop komandan", sementara di pihak lain, Ilham atas partai Demokrat dengan tagline "perubahan baru", mewarnai hampir seluruh medium advertising kota Makassar, tidak terkecuali berita pada tiga surat kabar tersebut. Kecenderungan yang tampak kemudian adalah komunikasi politik berorientasi massa, di karenakan kedua figur tersebut semakin intens di blow up bahkan eksistensi partai semacam dipertarungkan dalam ruang publik (Golkar versus Demokrat).

Khususnya dalam konteks pemberitaan Pemilukada Sulsel 2013, secara implisit Koran *Harian Rakyat Sulsel* cenderung menonjolkan isu tentang potensi kemenangan Syahrul Yasin Limpo atas Ilham Arief Sirajuddin pada Pemilukada Sulsel 2013 mendatang. Meskipun secara samar mengangkat perspektif berita tentang konflik internal partai DPD Golkar Sul-Sel, yakni persaingan kader memperebutkan posisi wakil Gubernur pendamping Syahrul Yasin Limpo.

Koran *Tribun Timur* pada sisi lain, nampaknya lebih kritis menyikapi persoalan mengenai kedua figur tersebut, tetapi ada indikasi bahwa Koran *Tribun Timur* sendiri cenderung berpihak pada Ilham Arif Sirajuddin. Konstruksi judul yang bernada seruan moral, misalnya "Aco: Jangan Ulang Kekalahan Amin Syam" menyiratkan bahwa inilah bentuk dukungan Koran *Tribun Timur* terhadap Ilham Arif Sirajuddin (Aco).

Secara komprehensif hasil analisa tentang bagaimana critical discourses analysis atau analisis secara linguistik pada teks Pemilukada

Sulsel 2013 antara Koran *Harian Rakyat Sulsel*, *Koran Tribun Timur* dan *Koran Sindo* dijelaskan sebagai berikut.

A. Critical Discourse Analisis Koran *Harian Rakyat Sulsel*

Konstruksi Headline (judul berita) merupakan refleksi pilihan editor dari berita penting dan berita yang sengaja ditonjolkan untuk pembaca. Dengan kata lain, merepresentasikan muatan ideologis tertentu dari media yang ditampilkan melalui judul maupun teks berita.

Hasil penelusuran berita pada *Koran Harian Rakyat Sulsel*, proses awal yang dilakukan adalah mereduksi dan mengkategorisasi data berdasarkan multivarian headline dan selanjutnya teks-teks pemberitaan diinterpretasi melalui model critical linguistic. Hasil reduksi dan kategorisasi teks berita tersebut di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Koran Rakyat Sulsel: Konstruksi Headline Pilgub 2013

Kategori Isu		Judul Berita	Publikasi/ Halaman
KAMPANYE POLITIK	A Propaganda Politik Petahana.	1. Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Kembali Jadi Jualan ‘Sayang’	1) 04/06/2012 Halaman 1
		2. Perang Dunia Maya, SYL-IA “Kuasai Senjata”	2) 14/06/2012 Halaman 4
		3. Garuda’Na Manfaatkan Ramadhan Jadi Ajang Sosialisasi. Dikemas Dalam Bentuk Safari Ramadhan Seluruh DPC Se-Sulsel	3) 23/06/2012 Halaman 2
	B Trend situs jejaring sosial	4. SYL Buka Puasa Bersama Warga Toraja.	4) 22/05/2012

		5. Tarawih Dari Kelurahan Ke Kelurahan. Aziz Tausiyah Dan Dengar Keluhan Pedagang 6. Sean Akan Jadi Tim Kampanye IA. Hanura Rekomendasi Ilham-Aziz	5) 31/06/2012 Halaman 1 6) 14/07/2013 Halaman 2
RIVALITAS ANTAR KANDIDAT	A Perbandingan kekuatan figur calon gubernur Sul-sel. B Konstruksi Citra Incumbent Melalui Opinion Leader	1. JK Tegaskan, SYL Banyak Penghargaan, Foke Tidak 2. SYL Pamer Bos Parpol, IA Jual Menteri SBY 3. Hampir Pasti SYL – IA Knok Out Garuda'na. 4. Tim Jokowi-Ahok Siap Bantu Garuda'na 5. Garuda'na Agresif, Tawarkan Mahar Berlipat 6. Sayang Unggul Jumlah Pendukung Parpol 7. Perang Perebutan Parleme Dan Parpol Usai. Sayang Menangkan Kursi, IA Kuasai Partai Politik 8. Calon Gubernur “Jualan” Plakat (Ilham Dapat Antara Award, Syahrul Rebut Adhikarya Pangan).	1) 22/07/2012 Halaman 4 2) 08/07/2012 Halaman 2 3) 07/07/2012 Halaman 1 4) 07/07/2012 5) 29/07/2012 Halaman 1 6) 30/07/2013 Halaman 4 7) 26/07/2013 Halaman 2 8) 14/03/2012

COUNTER POLITIK	A Negative Campaign	1. Kapal Induk Mulai Bombardir Rumah Rakyat. Kemas SYL Way, Nobar di 1.000 titik. Demokrat Bilang, SYL Way bukan Ancaman	1) 04/07/2012 Halaman 4
		2. Syahrul Tegaskan, Tim Sayang Tidak Akan Kalah	2) 16/07/2012 Halaman 4
		3. Anis Matta Yakin IA Menang	3) 26/07/2012
		4. Rumah Lebih Bagus Dari Kapal	4) 06/07/2012
	B Penantang Versus Petahana	5. Garuda'na Beraksi; Sambar Parpol Pengusung IA	5) 28/06/2012 Halaman 4
		6. Masjid Jangan Dijadikan Akrobat Politik. Program Tali Kasih Serahkan Asuransi Dan Bedah Rumah	6) 20/07/2012 Halaman 1
		7. Aziz Pertanyakan Maksud Politisasi Masjid.	7) 27/07/2012 Halaman 2
POLARISASI KONSTITUEN	A Politisasi Survei dan Konstruksi realitas.	1. Massa Galau Tinggi, Sayang Tetap Kokoh	1) 05/07/2012 Halaman 1
		2. Waspada, Swing Voters Di Pilgub Tinggal 20-An Persen	1) 27/07/2012 Halaman 2
		3. Garuda-Na Makin Pede Menang Di Luwu Raya	2) 05/01/2012 Halaman 3
		4. Gerindra Torut Antusias Menangkan Garuda'na. Kesira Menjakau Hingga Pelosok.	3) 27/01/2012 Halaman 1
	B Politik Identitas Kandidat	5. Ok Community Toraja Berjuang Menangkan Sayang.	4) 11/07/2012 Halaman 1
		6. Amping Dan Istri Mendukung Ilham. Ilham Keturunan Bangsawan Toraja	5) 20/07/2012 Halama 1

Sumber Data: Arsip Redaksional Koran Harian Rakyat Sulsel 2013

1. Kampanye Politik

Tema dominan yang diangkat oleh Koran *Harian Rakyat Sulsel* dalam pemberitaannya adalah seputar kampanye politik masing-masing kandidat calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013. Dalam konteks ini, Koran *Harian Rakyat Sulsel* bertindak sebagai sarana bagi komunikasi kampanye para elit politik, melalui berita, editorial, maupun iklan. Semua rubrikasi tersebut membantu konstruksi citra dan penyajian isu politik. Kepada pembaca, pemberitaan Koran *Harian Rakyat Sulsel* lebih cenderung menyajikan cerita yang membentuk kesan tentang pentingnya kredibilitas, kinerja, maupun reputasi kandidat tertentu.

Contoh, berita Koran *Harian Rakyat Sulsel* berjudul “*Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Kembali Jadi Jualan Sayang*” Secara implisit, gambaran temporal kepemimpinan “Sayang” melalui berita ini memiliki motif tersembunyi yang lebih bersifat propagandis, yakni sebetulnya kontrak politik paket “Sayang” dengan masyarakat menjelang Pilgub Sulsel 2013. Hal tersebut dikontraskan melalui argumen komunikator yang menyatakan “*pendidikan dan kesehatan gratis*” bagi masyarakat jika memilih kembali paket “Sayang” dalam Pilgub 2013.

Konstruksi wacana Pilgub 2013 pada Koran *Harian Rakyat Sulsel* yang berkaitan dengan kategori kampanye terdiri dari dua sub tema, yaitu: 1) Propaganda politik petahana, dan 2) Trend situs jejaring sosial sebagai medium komunikasi politik.

1.a. Propaganda Politik Petahana

Propaganda politik menurut Leonard W. Dobb, dipahami sebagai suatu usaha individu atau individu-individu yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan jalan menggunakan sugesti. Sedang Harbert Blumer mengemukakan bahwa propaganda dapat dianggap sebagai suatu kampanye politik yang dengan sengaja mengajak dan membimbing untuk memengaruhi orang guna menerima suatu pandangan, sentimen atau nilai tertentu.

Propaganda politik dapat merupakan kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk menggunakan sugesti, untuk memengaruhi seseorang atau kelompok agar melaksanakan atau menganut suatu ide (ideologi, gagasan sampai sikap), atau kegiatan tertentu dengan kesadarannya sendiri tanpa merasa dipaksa/terpaksa. Pada headline "*Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Kembali Jadi Jualan paket Sayang*", propaganda politik petahana terkait dengan salah satu teknik propaganda, yakni propaganda merakyat (plain foks), yaitu menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat.

Melalui konstruksi fakta historis, sosok figur politik dicitrakan positif kepada pembaca dengan penekanan makna bahwa kandidat tersebut benar benar merakyat ketika diposisikan sebagai pemerintah. Asumsi yang menjadi latar berita ini adalah proyek pemerintah tentang "*Pendidikan Dan Kesehatan Gratis*", dimana aspek ini sekaligus menyiratkan sebuah kepentingan lain di baliknya, yakni suatu usaha dari

elit politik untuk mempertahankan kekuasaan, Koran *Harian Rakyat Sulsel* edisi 04 juli 2012, yang isi beritanya:

... Agus mengatakan, jika masyarakat Pangkep masih menginginkan semuanya serba gratis, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, maka masyarakat pangkep harus kembali memilih dirinya pada pemilukda Gubernur Sulsel 2013 mendatang mendampingi Syahrul Yasin Limpo....

(Dokumentasi, 4 Juli 2012)

Mencermati konteks kalimat komunikator yang mengatakan, jika masyarakat Pangkep masih menginginkan semuanya serba gratis, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, maka masyarakat Pangkep harus kembali memilih dirinya pada Pemilukada Sulsel 2013.

1.b.Trend situs jejaring sosial

Salah satu kecenderungan umum berkenaan dengan kampanye politik para kontestan Pemilukada Sulawesi Selatan, adalah kampanye online dengan menggunakan situs jejaring social (facebook, twitter dan atau website). Kecenderungan para kandidat untuk menggunakan situs jejaring sosial dalam berkampanye sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, di mana metode kampanye secara online tersebut digunakan untuk memperoleh dukungan dari para pengguna layanan internet yang mayoritas masyarakat urban, termasuk masyarakat di beberapa pelosok daerah tertentu di Sulawesi Selatan.

Kaitannya dengan eksistensi media lokal di Sulawesi Selatan terutama Koran *Harian Rakyat Sulsel*, dalam taraf tertentu media ini pun cenderung mengadopsi sebagian wacana politik yang berkembang pada

masyarakat maya (cyber space). Sebagai contoh, berita dengan judul “*Perang Dunia Maya, SYL-IA Kuasai Senjata*” yang dipublikasi oleh *Harian Rakyat Sulsel* edisi 14 juli 2012, yang isi beritanya:

... Di banyak negara, situs jejaring sosial menjadi media kampanye paling efektif untuk mendulang massa di tengah makin mahalnnya harga iklan di televisi ...

... Pengamat sosial dan politik UVRI Makassar, Radiyani Rachim mengatakan, pemanfaatan situs jejaring sosial sebagai alat kampanye oleh calon gubernur Sulsel ini belum cukup efektif karena hanya dapat disentuh oleh kalangan tertentu, utamanya masyarakat urban di perkotaan...masyarakat kita masih didominasi oleh pemilih tradisional. Masyarakat yang lebih percaya pada tokoh adat tokoh agama yang masih menjadi opinion leader

(Dokumentasi, 14 Juli 2012).

Berita tersebut dikategorikan ke dalam tema kampanye karena substansi pesan yang disampaikan menjelaskan peristiwa kampanye politik para kandidat Pilkada Sulawesi Selatan melalui situs jejaring sosial. Berita ini diperkuat dengan sebuah latar historis penggunaan situs jejaring sosial sebagai alat komunikasi politik yang dipopulerkan oleh Barack Obama pasca kampanye Pilpres Amerika Serikat 2009. Latar ini digunakan Koran *Harian Rakyat Sulsel* sebagai alasan pembenar gagasan/isu tentang pentingnya media online sebagai sarana komunikasi politik saat Pilkada.

Selain sebagai strategi penonjolan isu, berita ini juga menampilkan detail informasi yang tampaknya tidak berimbang dengan memposisikan ketiga kandidat Gubernur secara diametral ke dalam urutan teks dan hasil kuantifikasi survei. Dengan kata lain, makna yang dihadirkan kepada

pembaca adalah suatu upaya untuk mengasosiasikan kekuatan teknologi komunikasi sebagai representasi kekuatan figur.

Sampel pada teks yang berbunyi “dari tiga pasangan kandidat gubernur, akun Syahrul Yasin Limpo yang paling banyak. Baik itu Twitter maupun Facebook. Ilham Arif Sirajuddin juga tidak sedikit. Sayang dan IA, dua rival kuat tampaknya paling menguasai “senjata” dunia maya ini. Sedangkan Rudyanto Asapa, berdasarkan penelusuran Koran *Harian Rakyat Sulsel*, masih belum maksimal.

2. Rivalitas Antarkandidat

Tema besar kedua setelah kampanye politik adalah rivalitas antarkandidat dalam narasi pemberitaan Koran *Harian Rakyat Sulsel*. Jika kampanye politik membicarakan bagaimana pesan politik para kandidat diwacanakan melalui berita, rivalitas antarkandidat lebih menggambarkan basis kekuatan masing-masing figur politik, baik dengan memanfaatkan komentar opinion leader (tokoh politik atau pengamat politik), klaim rasionalitas hasil survei oleh lembaga survei tertentu, relasi partai dengan elit politik dan berbagai indikator lainnya.

2.a. Perbandingan Kekuatan Figur Calon Gubernur Sul-Sel

Model konstruksi pemberitaan Koran *Harian Rakyat Sulsel* terhadap ketiga calon Gubernur dan wakil Gubernur tersebut digambarkan secara diametral dan memiliki perbedaan signifikan. Masing-masing pasangan kandidat dicitrakan sedemikian rupa kepada pembaca dengan

menekankan perbedaan kekuatan politik di antara mereka dengan mengutamakan asumsi-asumsi survei.

Contoh dalam detil berita, “*Sayang VS IA, Masih 20 Persen Lebih*”, menampilkan informasi yang bersifat generalisasi hipotesis yang memprediksi kemenangan Sayang berdasarkan hasil perhitungan survei tiga lembaga survei dengan rasionalisasi metode surveinya. Pada kenyataannya, detil yang dijelaskan lebih besar terhadap posisi incumbent, sedangkan IA dan Garuda’na terpinggirkan dalam wacana dengan memberi detil kecil.

... Seandainya Pilgub Sulsel dimajukan pada hari ini, hasilnya menempatkan incumbent masih kokoh di puncak. Baik popularitas maupun elektabilitas ... Direktur Eksekutif IPI, Suwadi Idris Amir mengatakan, Sayang unggul di semua Dapil di Sulsel

... Merujuk pada hasil survei ini, jarak perbedaan Sayang vs IA, masih 20 persen ... hanya Makassar dan Sinjai, Sayang kalah tipis di bulan Juni ini

... Juru Bicara Garuda’na, Nasrullah Mustamin mengakui Garuda’na memiliki kalkulasi sendiri ... Kita bisa lihat hasil pilgub Jakarta di mana Jokowi-Ahok yang dalam survei oleh beberapa lembaga survei hanya mendapat belasan persen suara, namun mampu mengumpulkan hingga 40 persen lebih

(Dokumentasi, 13 Juli 2012)

Jumlah partai pendukung/koalisi, terlebih partai besar dan berkuasa di tingkat nasional seperti Demokrat, Golkar, PAN, PDI-P, PKS dan partai besar lainnya, merupakan representasi kekuatan politik Cagub-Cawagub yang kerap diwacanakan *Harian Rakyat Sulsel*. Hal ini seakan menjadi indikator kapabilitas pemimpin. Sebagai konsekuensinya, konstituen akan cenderung mengedepankan dominasi kekuasaan partai berdasar logika

mayoritas suara konstituen tanpa mendahulukan pertimbangan kritis terhadap kualitas personal figur politik.

Eksistensi suatu media dengan relasi kekuasaan politik dan capital didalamnya turut memapankan situasi tersebut. Praktek pemilihan Gubernur secara langsung, segi popularitas dan seberapa besar dukungan finansial para kontestan lebih menonjol dibandingkan dengan kualitas calon, sehingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh rakyat tidak menjamin bahwa akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

2.b. Konstruksi Citra Incumbent Melalui Opinion Leader

Sampel yang dikemukakan terkait berita yang berjudul “JK Tegaskan, SYL Banyak Penghargaan, Foke Tidak” dan “Sayang VS IA, Masih 20 Persen Lebih” menguraikan wacana tentang pertarungan kekuatan antara kandidat Pilkada Sulsel, meskipun lebih cenderung menonjolkan kekuatan salah satu kandidat dibanding kandidat lainnya.

...Foke itu beda dengan kau (Syahrul). Kau banyak prestasimu, Foke tidak, kata JK, seperti yang dikutip Kepala Badan Kesbang Sul-Sel, Tau Toto Ranggina ...

...Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang misalnya sudah cukup di back-up partai Golkar, PDI-P, PDS, PDK ... begitu juga dengan kandidat Ilham Arif Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakkar, kendati PKS mengeluarkan rekomendasi ke pasangan nasionalis-religius ini, namun tak berpengaruh signifikan

...PKS dan PAN Bisa Hanya Jadi Partai Penggembira”. Lambannya mengeluarkan rekomendasi, akhirnya membuat partai Islam pun dianggap partai pelengkap dalam Pilgub Sul-Sel 2013 mendatang

(Dokumentasi, 22 Juli 2012)

Kekuatan Syahrul Yasin Limpo sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Selatan 2013 yang merupakan incumbent diasosiasikan dengan partai besar dan berkuasa, seperti Golkar, PDI-P, PDS, PDK. Demikian halnya dalam detil berita tersebut, menampilkan informasi yang menguntungkan posisi Syahrul Yasin Limpo sebagai kandidat Gubernur, dengan menonjolkan citra positif incumbent berdasarkan pengakuan/komentar Jusuf Kalla (opinion leader) yang membandingkan kekuatan dua figur antara Foke dan SYL. Sementara keberadaan IAS dalam narasi pemberitaan dinominalisasi dengan detil yang kecil.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa media dapat membentuk citra politik individu yang menjadi khalayak media ke arah yang dikehendaknya. Dengan kata lain, media juga dapat mengarahkan khalayak dalam mempertahankan citra yang sudah dimilikinya melalui agenda setting. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa berita ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing pembaca.

3. Counter Politik

Tema ketiga yang muncul dari kategorisasi pemberitaan Koran *Harian Rakyat Sulsel* adalah counter politik. Tema ini erat berkaitan dengan semakin menguatnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam Pemilukada Sulawesi Selatan 2013. Rivalitas yang sudah terkonsentrasi pada tiga kandidat itulah yang menyebabkan blocking dukungan kian menjadi-jadi. Salah satu akses dari strategi

persuasi dan penetrasi para kandidat itu cenderung menyebabkan terjadinya polemik atau gesekan antar pendukung.

Kamus politik, hal demikian sering disebut kampanye menyerang. Ada dua jenis kampanye menyerang, yaitu kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign). Kampanye negatif merupakan menyerang kandidat lain dengan sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi atau menampilkan fakta-fakta pendukung yang menjadi titik lemah dari kandidat lawan.

Sementara kampanye hitam, biasanya dilakukan dengan cara operasi bayangan, menyebar isu, gerakan sporadis provokasi untuk tidak memilih kandidat lawan, tetapi penyebaran operasinya biasanya dilakukan oleh sumber yang anonim, tidak begitu jelas dan tidak mudah dilacak.

Dikaitkan pada berita Koran *Harian Rakyat Sulsel*, kontruksi realitas kampanye menyerang tersebut dikategorikan ke dalam tema counter politik seperti dijelaskan pada berita 1) Kapal Induk Mulai Bombardir Rumah Rakyat. 2) Syahrul Tegaskan, Tim Sayang Tidak Akan Kalah.

3.a. Negative Campaign

Materi kampanye Pilkada Sulawesi Selatan selain menampilkan kapasitas dan kepribadian calon, juga menyerang secara tidak langsung kandidat lawan. Kampanye negatif dalam konstruksi berita dilihat secara samar pada konteks kegiatan tim Sayang, yakni program SYL Way. Kegiatan tim Sayang dalam rangka kampanye tersebut sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bentuk infiltrasi politik tim Sayang ke dalam basis

konstituen IA, khususnya di wilayah Makassar yang selama ini diklaim pihak IA sebagai basis konstituennya. Namun, yang menarik untuk dikemukakan adalah pernyataan Syahrul dan tim Sayang yang eufemistik dan cenderung bernada negative campaign.

Contoh pada headline “Kapal Induk Mulai Bombardir Rumah Rakyat”, dimana kalimat Syahrul membangun image positif bagi dirinya sendiri, bahwa ia tidak memiliki uang miliaran untuk membuat iklan di televisi nasional (ditafsirkan tidak menghambur-hamburkan uang).

...Syahrul mengungkapkan, dirinya tidak memiliki uang miliaran untuk membuat iklan di televisi nasional. Karenanya, SYL Way merupakan program cerdas yang sifatnya inspiratif dengan biaya yang murah

...Manajer Produksi Program SYL Way, Maqbul Halim, mengatakan, produksi SYL Way hanya menghabiskan dana Rp. 11 juta untuk 11 edisi. Angka tersebut memang tidak sebanding dengan biaya iklan yang dikeluarkan ‘tetangga kita’ yang jumlahnya bermiliar-miliar

(Dokumentasi, 04/07/2012)

Pernyataan dari Manajer Produksi Program SYL Way, Maqbul Halim, tersirat makna yang seakan melegitimasi gagasan dalam teks tentang program strategis SYL Way. Hal tersebut secara tidak langsung mendekonstruksi citra kandidat lain (khususnya IA) dengan menekankan fakta kecenderungan metode kampanye melalui media nasional yang dianggap sebagai pemborosan dan sumber dananya sering dikaitkan dari hasil money laundry atau hasil korupsi.

3.b. Penantang Versus Petahana

Latar pada headline “Syahrul Tegaskan, Tim Sayang Tidak Akan Kalah”, dikonstruksi untuk menggiring pandangan khalayak kepada isu tentang popularitas, elektabilitas dan tren kemenangan Jokowi-Ahok pasca Pilgub DKI Jakarta yang mengalahkan Incumbent. Peristiwa yang digambarkan Koran Harian Rakyat Sulsel tersebut menunjukkan bagaimana terjadi perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut (incumbent kalah di Pilgub DKI Jakarta). Pihak yang berkompeten, tim IA, tim Garuda’na, dan tim Sayang, masing-masing mengajukan klaim, versi kebenaran masing-masing untuk memaknai peristiwa tersebut.

Headline di atas menjelaskan tiga topik yang berbeda tentang klaim kemenangan masing-masing pihak dari pasangan kandidat Gubernur Sul-Sel, mengangkat argumentasi dari tiga kelompok besar yang diskemakan secara dialogis, tetapi justru membagi suasana dialog tersebut ke dalam logika “dua banding satu”, yakni IA-Garuda’Na versus Sayang.

...Kemenangan Jokowi membuat kami tim IA semakin optimistis mampu mengalahkan incumbent ... karena menurut kami, apa yang ada pada Jokowi yang dinilai merakyat, sama dengan sosok pasangan kami (IA)...Perlu digarisbawahi tim Jokowi-Ahok hanya bekerja selama empat bulan, namun mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ahok dengan persentase 40 persen lebih ... apalagi Garuda’na yang punya waktu enam bulan
Kita lihat saja para calon di sana, jualannya kan pendidikan dan kesehatan gratis. Itu nyontek loh di Sul-Sel. Kita sudah lebih duluan ... Syahrul mengungkapkan, dirinya telah bekerja sejak lima tahun lalu, bukan menjelang pilgub 2013.

(Dokumentasi, 16 Juli 2012).

Mencermati konteks pemberitaan secara menyeluruh, proporsi detail sengaja dikecilkan untuk incumbent agar khalayak tidak lagi mempersoalkan mengapa judul yang diajukan lebih mengedepankan klaim sugestif dan eksplisit bahwa “Syahrul tegaskan, tim Sayang tidak akan kalah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setidaknya dapat disimpulkan dua proposisi yang berbeda dalam rangkaian berita tersebut. Pertama, isu tentang kekalahan incumbent (kemenangan Jokowi-Ahok pasca Pilgub DKI Jakarta) dikemukakan untuk memperkuat posisi kandidat penantang (IA dan Garuda’na) sekaligus mereduksi kekuatan petahana.

Kedua, sebagai antitesa atas isu kekalahan incumbent tersebut, maka konstruksi judul, penekanan makna plagiarisme (program Sayang tentang pendidikan dan kesehatan gratis yang diklaim banyak ditiru oleh kandidat lain), dan posisi petahana yang tersudutkan sengaja dimunculkan dalam berita. Hal ini dalam taraf tertentu bisa memengaruhi dukungan pemilih terhadap kandidat penantang atau justru pembaca dapat lebih menaruh simpati terhadap incumbent.

4. Polarisasi Konstituen

Polarisasi konstituen juga merupakan tema dominan dalam pemberitaan Koran *Harian Rakyat Sulsel*. Wacana politik dalam tema ini dikonstruksi dengan memberi penekanan pada polarisasi antar kelompok politik, baik polarisasi partai pendukung dan konstituen kandidat berdasarkan konstruksi realitas sosial lembaga survei, maupun polarisasi

konstituen yang dilatarbelakangi oleh isu primordialisme/etnisitas di antara kandidat Pilgub Sulawesi Selatan

4.a. Politisasi Survei dan Konstruksi realitas

Berita dengan judul “Massa Galau Tinggi, Sayang Tetap Kokoh”, menunjukkan sebuah latar tentang kekuatan lembaga survei untuk memengaruhi opini publik melalui strategi publikasi hasil survei yang menonjolkan tingkat popularitas dan elektabilitas figur politik tertentu dalam kontestasi Pilkada. Mewacanakan survei melalui media dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mengkonstruksi realitas kandidat tertentu, bahkan kadang dipublikasi secara eksplisit dengan menyertakan klaim otoritas para pengamat politik untuk memperkuat objektivitas hasil survei tersebut.

...untuk tingkat elektabilitas Sayang II masih mendominasi 45,5 persen, menyusul Ilham Aziz 19,2 persen, dan Garuda'na 8,3 persen. Menariknya massa mengambang masih tinggi 27 persen, katanya
...Bisa saja incumbent terkejar. Apalagi, sudah banyak kasus petahana (incumbent) kalah, bahkan pada pilgub Sulsel 2008 lalu, petahana pun kalah, jelasnya

(Dokumentasi, 05/07/2012)

Konteks pemberitaan yang menjadi headline dari rilis tersebut adalah temuan survei yang bisa mengundang banyak tanggapan dan polemik. Misalnya temuan survei yang menunjukkan reaksi publik, popularitas tokoh politik, perolehan suara partai politik, dan seterusnya. Namun, pertanyaan kritis yang relevan dikemukakan terkait rilis survei tersebut adalah kebenaran metodologi, seperti kriteria pemilihan sampel, pertanyaan yang

diajukan dalam survei, atau bagaimana teknis melakukan wawancara, maupun menyoal kredibilitas lembaga survei yang sering merupakan rekayasa politik atau proyek yang didanai oleh lembaga/elit politik tertentu.

Kenyataan yang terjadi, menunjukkan bahwa survei politik sarat dengan kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Melalui survei politik, mereka berusaha mengiring opini publik untuk mendukung atau menolak satu orang atau golongan tertentu. Terlepas dari soal kredibilitas atau tidak kredibilitasnya lembaga survei, argumentasi yang juga penting untuk dikemukakan adalah terjadi politisasi terhadap hasil survei.

Kelompok atau perorangan yang merasa diuntungkan dengan hasil survei tersebut akan selalu mengutip hasil survei tersebut. Sebaliknya kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan oleh hasil survei tersebut akan membatah bahkan menuding kebenaran rilis survei.

4.b. Politik Identitas Kandidat

Pilkada Sulawesi Selatan 2013 melalui penggambaran harian Rakyat Sulsel, menjadi ruang kontestasi para kandidat yang sering dihubungkan dengan etnisitas masyarakat Sulawesi Selatan. Tiga pasangan calon dianggap mewakili berbagai etnis di Sulawesi Selatan, yakni pasangan Rudyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda'na) sebagai representasi etnis Bugis, pasangan Ilham Arif Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (Rumah Rakyat) juga representasi etnis Bugis, dan pasangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Numang (Kapal Induk) sebagai representasi etnis Makassar dan etnis Bugis.

Konstruksi wacana tentang etnisitas tersebut merupakan bagian dari politik identitas para kontestan Pemilu. Pemahaman politik identitas mengacu pada seorang filsuf poststrukturalis-postmodernis Perancis, Michel Foucault yang mengkritik konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (biopolitik) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh .

Agnes Heller mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan perbedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis .

Munculnya politik etnis diawali tumbuhnya kesadaran orang yang mengidentikan diri mereka ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, yang kesadaran itu memunculkan solidaritas kelompok. Dari teoritis poststrukturalis kemudian postmodernitas yang mengkritik modernitas khususnya terhadap wacana etnis dalam konteks politik (ethnic politic). Politik identitas etnis merupakan proses dari kegagalan modernitas dalam memenuhi janjinya.

Etnisitas yang menjadi ikatan yang sangat emosional dan mendalam telah melahirkan perjuangan kelompok-kelompok etnis tertentu dari dominasi etnis mayoritas. Etnisitas berkaitan pula dengan kebudayaan

masing-masing yang memiliki ciri khas dari kelompok etnis tersebut, dalam kelompok tersebut terjadi keterikatan antara orang-orang dalam kelompok tersebut atau dikenal sebagai primordialisme. Sehingga tidak jarang keterikatan etnis ini dimanipulasi dan dijadikan alat atau kendaraan oleh kelompok elite dalam memperebutkan sumber kekuasaan, terutama di daerah yang penduduknya heterogen.

B. Critical Discourse Analisis Berita Koran Tribun Timur

Proses analisis teks pada Koran *Harian Rakyat Sulsel*, tahap awal yang dilakukan adalah mereduksi dan mengkategorisasi data berdasarkan multivarian tema dan teks-teks berita Pilkada Sulsel 2013 Tribun Timur. Hasil reduksi dan kategorisasi berita tersebut terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Koran Tribun Timur: Konstruksi Headline Pilgub 2013

Kategori Isu	Konstruksi Judul	Waktu Publikasi
KAMPANYE POLITIK	1. Aco: Jangan Ulang Kekalahan Amin Syam	1) 05/12/2011
	2. Amien Rais Siap Jadi Jurkam Cagub Ilham-Aziz	Halaman 1 dan 2
	3. Ilham-Aziz Ingin Semangat Baru, Roem Ingin Bergabung	2) 24/06/2012 06:34
	4. Ilham Tolak Kampanye Hitam	3) 05/01/2012 17:13
	5. Ilham, IA Tetap Bersama JK	4) 27/01/2012-19:50
	6. Ilham, Jangan Pilih Calon yang Tidak Punya Karya	5) 07/05/2012-08:51 6) 11/09/2012
	7. Pasangan IAS-AQM Jadi Foto Profil BBM	23:20
	8. Sayang Kampanye Di Karebosi, Tim IA Bilang: Alhamdulillah.	7) 22/01/2012-12:10 8) 04/ 01/2013-00:11

RIVALITAS ANTAR KONDIDAT	1. Pilgub 2007 Berpotensi Terulang 2. Demokrat Lobi 6 Parpol 3. Ilham-Aziz Siap Hadapi Gubernur Incumbent Sulsel 4. Rudyanto-Nawir Hanya Didukung Partainya Prabowo 5. SBY Kaji Paket Cagub Sulsel Ilham Arief-Aziz Qahhar 6. Syahrul: Feeling Saya Koalisi Parpol Masih Oke. 7. Politisi Golkar Sebut Tim Pesaing SYL Kampanye Hitam. 8. Jubir IA: Justru Syahrul-Agus yang Suka Jual Aset Negara	1) 05/02/2012-19:49 2) 10/02/2012-19:18 3) 10/01/2012 16:16 4) 21/01/2012 21:55 5) 05/05/2012 6) 26/01/2012 7) 12/01/2013 16:34
COUNTER POLITIK	1. Andi Mudzakkar; Bapak Saya Bukan Pemberontak 2. Kubu Putra Kahar Muzakar Kritik Yasin Limpo Soal Pemberontak 3. Elit Golkar Sulsel Gerah dengan Langkah Ilham Pasang JK 4. Golkar; Ilham-Aziz Tak Mungkin Dapatkan Sejuta Suara 5. Tim IA: Dinasti Syahrul Mulai Ancam Masyarakat Sulsel 6. Inilah Black Campaign Yang Ditujukan ke SYL 7. Jubir IA: Justru Syahrul-Agus yang Suka Jual Aset Negara 8. Politisi Golkar Sebut Tim Pesaing SYL Kampanye Hitam	1) 10/06/2012 21:18 2) 11/05/2012 23:28 3) 02/05/2012 22:22 4) 22/05/2012 21:52 5) 02/02/2013 6) 27/01/2012 20:21 7) 12/01/2013 16:34 8) 26/01/2012

Sumber Data: Arsip Redaksional Koran Tribun Timur 2013

1. Kampanye Politik

Konteks Pilgub Sulsel 2013, Koran Tribun Timur memiliki kepentingan besar untuk meliput peristiwa tersebut. Selain karena peristiwa politik merupakan lahan komoditas ekonomi, media sesungguhnya memainkan peran politisnya. Peran politis media dapat dicermati pada sejauhmana media bersangkutan dapat menggiring opini publik melalui berita, terlebih saat isu itu dipublikasi dalam arena politik yang dapat memicu berbagai reaksi dari lembaga/parpol, para aktor politik, massa/konstituen dan atau simpatisan politik. Dalam kaitan ini, tampak kepentingan ideologis media yang terserap ke dalam teks-teks pemberitaannya.

Hal tersebut dapat dianalisis misalnya pada Headline Koran Tribun Timur "Aco: Jangan Ulang Kekalahan Amin Syam" publikasi 5 Desember 2011. Secara skriptural berita tersebut sarat dengan berbagai muatan ideologis yang menyampaikan pesan-pesan (kampanye politik) paket IA. Latar ideologis pada berita ini menunjukkan bahwa Ilham meminta dukungan total di Bumi Arung Palakka (Bone) ketika menghadiri sejumlah kegiatan di wilayah tersebut.

Realitas pasangan IAS memang sangat intensif melakukan penetrasi ke berbagai daerah di Bone dengan menebar janji politik yang sama pada Pilgub 2007, yakni menjanjikan akan melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Bone dan Sengkang. Intensitas road show (kampanye) di Bone menjadi keniscayaan karena

Ilham sendiri tampak khawatir jika kekehalahannya di Pilgub 2007 terulang. Hal itu diartikulasikan oleh Ilham dengan kalimat “kehalahan di pilgub kemarin jangan sampai terulang kembali di 2013” ujar Ilham”.

Bentuk kampanye politik lainnya adalah konstruksi citra atau identitas. Koran *Tribun Timur* mengakomodasi upaya para kontestan Pilkada Sulsel 2013 untuk mencitrakan identitas melalui bahasa atau pilihan kata yang beragam dan bersifat simbolik. Pilihan kata untuk penamaan aktor politik menjadi penegas status sosial mereka dan merupakan strategi politik pencitraan.

Headline Koran *Tribun Timur* “Aco: Jangan Ulang Kehalahan Amin Syam”, adalah sebuah bentuk konstruksi citra dan upaya asosiasi figur berbasis kultural. Pada aspek ini Koran *Tribun Timur* mencoba mengkampanyekan Ilham Arif Sirajuddin sebagai putra daerah (asli orang Bone).

Ilham; “Aco adalah orang Bone bila ada yang mengatakan Aco bukan orang Bone berarti orang itu bukanlah orang Bone”. Aris; ”Siapapun kandidat yang bakal bersaing di pilgub 2013 harus cerdas melakukan sosialisasi”.....

(Dokumentasi, 05/12/2011).

Struktur retorik berita di atas secara ideologis mengkonstruksi makna kultural atas eksistensi figur Ilham sebagai orang Bone. Meskipun faktanya kalimat tersebut memang kalimat yang dikutip dari narasumber, tetapi penggunaan kalimat, misalnya “Bumi Arung Palakka”, dan personifikasi figur “Aco orang Bone” menunjukkan label kultural terhadap

objek pemberitaan bahkan berita ini seolah-olah menafikan atau mengalienasi pembaca (selain orang bone) dan cenderung berbau rasialisme.

2. Rivalitas Antarkandidat

Aspek ini lebih menggambarkan basis kekuatan dan sisi kelemahan masing-masing figur politik, baik dengan memanfaatkan komentar opinion leader (tokoh politik atau pengamat politik), klaim rasionalitas hasil survei oleh lembaga survei tertentu, relasi partai dengan elit politik dan berbagai indikator lainnya.

Realitanya, para kontestan Pilkada selalu mengandalkan hasil survey sebagai parameter kekuatan politik (popularitas dan elektabilitas) dan karena itu sering digunakan sebagai jargon politik dalam kampanye. Hal ini tampak pada teks berita "Ilham-Aziz Siap Hadapi Gubernur Incumbent Sulsel".

... Kita sudah deklarasi pasangan sekaligus launching gambar dan tagline, berdasarkan hasil survei, kami punya peluang, kami punya tingkat elektabilitas yang besar dan kami bisa bersaing dengan incumbent, kami belum sebut persentasinya karena itu menjadi motivasi kami," kata Ilham.

... Dengan prestasi saya sebagai wali kota dan membangun kota Makassar, begitupula dengan prestasi ustadz Aziz sebagai anggota DPD RI dan sebagainya, tentu saja kami mampu bersaing," tambah Ilham...

(Dokumentasi 10 Februari 2012)

Struktur pemberitaan tersebut juga sangat menggambarkan basis kekuatan paket IA dan tidak memberikan ruang wacana untuk petahana.

Selain mengungkapkan hasil survey, latar prestasi dan berbagai potensi figur, konstruksi teks menunjukkan basis kekuatan IA di lintas partai (koalisi), dukungan konstituen, komunitas, organisasi, dan para tokoh yang dianggap bernilai komoditas politik. Berikut contoh teks yang dimaksud:

...Sudah banyak partai yang akan berkoalisi dengan kami... ratusan peserta deklarasi yang memenuhi ruangan deklarasi... hadir Komunitas Pejuang Hidayatullah dari 24 kabupaten se-Sulsel dan se-Indonesia, Komunitas Pejuang Aziz Qahhar Mudzakkar se-Indonesia, 24 Ketua DPC Partai Demokrat se-Sulsel, Aco Community, Pacea Community, dan IAS-AQM Community Kabupaten Bone, Pemuda Pancasila, Komunitas Lintas Agama Kota Makassar, Komunitas Lintas etnis Sulsel, Komunitas Tionghoa, dan Komunitas Bugis-Makassar
... Terlihat Ketua Lajnah Tanfidziyah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Prof Noer Bachri Noer, Ketua Tim 11 KPPSI Sulsel, Dr Hamid Paddu MA, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD Nizar Shihab yang juga anggota DPR RI

(Dokumentasi, 10/02/2012).

Berbeda dengan teks di atas, headline Koran *Tribun Timur* "Pilgub 2007 Berpotensi Terulang", justru mengekspos titik kelemahan petahana dengan menguraikan sejarah kelabu Partai Golkar di Pilgub 2007. Secara eksplisit berita ini menunjukkan makna retorik "potensi konflik", bahwa internal partai Golkar kurang solid atau terjadi diharmonisasi di antara kader Golkar sendiri atas legitimasi dukungan terhadap SYL. Beberapa kader senior Golkar (Agus Arifin Nu'mang dan HM Roem) dan kader eksternal (Andi Muallim dan Ashabul Kahfi) mengincar posisi wakil Gubernur.

Adi Suryadi; "Dampak Faksionalisme pada saat itu melemahkan partai Golkar ... tarik menarik penentuan cawagub di internal Golkar dalam menuju pilgub 2013 saat ini, bisa berpotensi serupa jika konsensus internal Golkar tidak tercapai secara bulat". Irfan Jaya; potensi negatif itu, yakni kemungkinan terjadinya disharmonisasi di internal Golkar, hal ini disebabkan karena besarnya harapan bakal calon pendamping SYL. Sementara pada akhirnya hanya satu yang akan diakomodasi

(Dokumentasi 10 Februari 2012).

Potensi konflik segitiga Golkar sebagaimana komentar narasumber dapat dicermati pada koherensi antar-teks/kalimat berita, 1) kausalitas teks; kader Golkar memperebutkan posisi cawagub sehingga berpotensi menjadi biang konflik 2) koherensi penjelas; dampak faksionalisme melemahkan partai Golkar 3) koherensi pembeda; dua strategi pendekatan dalam memecahkan konflik di internal Golkar, yakni pendekatan partai dan pendekatan figur.

Dengan demikian berita ini mengajukan sebuah hipotesis, dimana akurasi data (5W+1H) serta argumentasi pengamat politik dikutip untuk mendukung hipotesis atau tema yang memprediksi bahwa "Golkar di ambang konflik" jika konsensus internal Golkar tidak tercapai secara bulat.

3. Counter Politik

Pilkada di sejumlah wilayah selalu ditandai dengan kampanye negative oleh kandidat. Masing-masing kandidat bukan hanya menonjolkan diri sendiri tetapi membuat citra negative kandidat lawan. Kampanye negatif ini ada yang dilakukan secara terangterangan lewat

kampanye terbuka, tetapi ada juga yang dilakukan secara tersembunyi, misalnya lewat selebaran atau percakapan dari mulut ke mulut.

Headline berita yang berbunyi "Andi Mudzakkar; Bapak Saya Bukan Pemberontak" dan headline "Kubu Putra Kahar Muzakar Kritik Yasin Limpo Soal Pemberontak" merupakan contoh berita Tribun Timur yang bernuansa kampanye negatif, dengan mengeksploitasi titik-titik kelemahan lawan untuk di ekspose ke ruang publik.

Senada dengan realitasnya, penekanan kata "pemberontak" secara sengaja diungkapkan dalam teks sebagai latar historis pemberitaan yang tujuannya tidak hanya mereview ingatan pembaca/khalayak terhadap peristiwa lampau, tetapi menjadi komoditas politik bagi media yang cenderung dapat dikomodifikasi dalam teks. Makna kata "pemberontak" pun bisa beragam jika perspektif pembaca berada dalam situasi politik seperti respon narasumber di bawah ini:

...Sudah bukan jamannya lagi ngomong pemberontak, kalau beliau berkata begitu berarti mengundang pemberontak, lagian siapa pemberontak yang dimaksud?, kalau ajakan lawan pemakai narkoba itu musuh kita bersama, bagus itu," kata Selle.

...Ajakan Pak Syahrul itu bisa diterjemahkan masyarakat bahwa, oh pemberontak itu adalah Kahar Mudzakkar, kenapa tidak, kan ada anaknya, Aziz, mau maju di pilgub, buktinya banyak reaksi masyarakat setelah kata itu keluar. Kalau sudah begitu kejadiannya, maka itu bisa membunuh hak sipil keluarga Kahar, bahkan bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Sulsel, padahal beliau kan gubernur bilang begitu, itu cara primitif," Hasbi menambahkan

...Ajakan lawan pemberontak dari Pak Syahrul dalam kapasitasnya sebagai gubernur, itu secara tiba-tiba. Padahal mulai beliau waktu jadi bupati, tidak pernah sebut kata-kata lawan pemberontak, tidak pantas beliau ngomong begitu, karena kata itu

punya trauma sejarah bagi penjajah," kata tim hukum IA Hasbi Abdullah

(Dokumentasi, 11/05/2012)

Manuver politik juga ditengarai dilakukan oleh kubu IA dengan dugaan melancarkan aksi kampanye hitam. Jika pihak SYL menyerang dengan isu pembunuhan karakter (kata ganti pemberontak) keluarga Qahhar Mudzakkar, maka pihak IA meng-counter dengan isu politik kekerabatan (dinasti politik). Hal tersebut terkait dengan munculnya pemberitaan berjudul "Inilah Black Campaign Yang Ditujukan ke SYL" edisi 27 Januari 2012.

Dinyatakan dalam teks terdapat selebaran yang berisi ajakan menolak dinasti politik keluarga SYL yang disebar oleh Gerakan Masyarakat Tolak Nepotisme (Gemas). Dalam selebaran itu dimunculkan nama keluarga Syahrul yang duduk di pemerintahan, di antaranya empat saudara Syahrul, yakni Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo, anggota DPRD Makassar Haris Yasin Limpo.

Wacana dinasti politik memang sangat potensial sebagai medium propaganda dalam kampanye dan sebab itu pula hampir seluruh media lokal di Makassar semakin intens mempublikasi isu tersebut sehingga mengundang berbagai reaksi di masyarakat. Hal ini misalnya dilihat pada headline Tribun Timur "Tim IA: Dinasti Syahrul Mulai Ancam Masyarakat

Sulsel". Respon negatif dari masyarakat bermunculan terutama pihak pendukung paket IA-AQM yang menolak kemenangan SYL pasca Pilgub Sulsel 2013 karena indikasi dinasti politik.

...Dinasti Syahrul Yasin Limpo sudah memperlihatkan sifat aslinya yang serakah kekuasaan, itu sudah mengancam masyarakat Sulsel. Belum Pilwali, baru mau digugat di MK, sudah mau merebut Wali Kota dengan cara-cara tidak elegant,"kata Selle

...Pasalnya, kata Selle, belum dilantik saja, sudah ada tanda-tanda dinasti SYL ingin berkuasa penuh di Sulsel, termasuk di Makassar. Padahal, periode pak Ilham masih sampai 2014 sebagai wali kota Makassar.

...Buat adik-adiknya pak Syahrul yang ingin memimpin Kota Makassar, yah tunggulah sampai KPU membuka tahapan pilkada Makassar, lalu bertarung. Jangan terlalu bernaflu lah," Selle menambahkan

(Dokumentasi, 02/02/2013)

Pihak yang lain, politik kekerabatan (dinasti politik) cenderung dilihat dalam perspektif nepotisme untuk meraih kepentingan/kursi kekuasaan yang melibatkan orang-orang terdekat/keluarga atau teman sejawat, tetapi di pihak lain justru menilai hal itu positif dan suatu kewajaran jika figur politik yang maju dalam pertarungan pilkada namun memiliki hubungan dengan petahana, mampu dan berintegritas menjadi pemimpin.

Menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistik, maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu

para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik.

4. Polarisasi Konstituen

Wacana politik dalam pemberitaan Koran *Tribun Timur* tentang Pilgub Sulsel 2013 dikonstruksi dengan memberi penekanan pada polarisasi antar kelompok politik, baik polarisasi partai pendukung, elektabilitas kandidat berdasarkan konstruksi realitas sosial lembaga survei, maupun polarisasi konstituen yang dilatarbelakangi oleh isu primordialisme di antara kandidat Pilgub Sulsel.

C. Critical Discourse Analisis Koran Sindo

Sebagaimana proses analisis teks pada Koran Harian Rakyat Sulsel dan Tribun Timur, tahap awal yang dilakukan dengan mereduksi dan mengkategorisasi data berdasarkan multivarian tema dan teks-teks berita Pemilukada Sulsel 2013 Koran Sindo. Reduksi dan kategorisasi berita tersebut terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Koran Sindo: Konstruksi Headline Pilgub 2013

Kategori Isu	Konstruksi Judul	Waktu Publikasi
KAMPANYE POLITIK	1.Rudiyanto Janjikan Pendidikan Gratis Di Sulsel.	1) 14/01/2013 15:44
	2.Sayang Ngotot Kampanye Di Lapangan Tamsi.	2) 12/01/2013 17:28
	3.Azis optimis menangkan Pilkada Sulsel	3) 22/01/2013 - 11:08
	4.Gerindra laporkan reklame IA ke Panwaslu	4) 22/11/2012

	5. Belum setor nama, KPU warning tim kampanye 6. Panwaslu sempit tim sukses Cagub Sulsel	5) 30/12/2012 6) 20/11/2012
COUNTER POLITIK	1. Black Campaign di Lutra terus berlanjut 2. Lakukan black campaign, dibayar Rp 500 Ribu 3. Pengambilan Nomor Urut Pilgub Sulsel Ricuh 4. Syahrul Kembali Ditohok Selebaran 5. Posco Cagub Sulsel Dilempar Bom Molotov 6. Jelang Pilgub, Toraja Waspada Teroris	1) 08/11/2012 -20:45 2) 06/10/2012 18:46 3) 20/10/2012 11:04 4) 08/10/2012 5) 13/12/2012 6) 15/01/2013
POLARISASI KONSITUEN	1. Bentrok Pilkada, JK anggap biasa 2. Bentrok Antar Pendukung Cagub Sulsel Kembali Pecah 3. Sidang Fathanah, Ilham Curhat Soal Mahalnya Biaya Pilgub 4. Polda Sulsel Bentuk 'Mabbulo Sibatang'	1. 01/02/2013 - 16:46 2. 13/01/2013 22:22 3. 19/08/2013 13:22 4) 21/11/2012 -15:12

Sumber Data: Arsip Redaksional Koran Sindo 2013

Kecendrungan tema berita Koran Sindo Pemilukada 2013 pada pemberitaan yang telah direduksi, nampak bahwa ideologi pemberitaan Koran Sindo masih pada skala nasional hingga internasional meski pada aspek pemberitaannya Koran Sindo berupaya untuk memuat berita lokal. Kecendrungan tersebut dapat di asumsikan bahwa Koran Sindo masih berada pada posisi netral serta pada keseragaman pemberitaan dan berimbang, hal tersebut dapat di perkuat dengan besaran proporsi/muatan pada pemberitaan politiknya dengan keseragaman isu politik yang

berkembang selama pemilihan kepala daerah khususnya pemilu pada 2013 yang lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa aspek berikut:

1. Kampanye Politik

Keseimbangan pemberitaan politik khususnya berita kampanye politik dapat dilihat pada keseragaman Koran Sindo dalam membangun berita tersebut. Dalam konteks Pilgub Sulsel 2013 Koran Sindo pada dasarnya memiliki kepentingan besar untuk meliput peristiwa tersebut. Peristiwa politik sebetulnya merupakan lahan komoditas dalam bisnis media informasi.

Peran media pada aspek ekonomi dapat dicermati pada sejauhmana media dapat menggiring bahkan mengubah opini publik melalui berita secara tekstual, hingga tanpa disadari opini tersebut terbentuk secara kontekstual pada masyarakat. Begitu pula peran politis media, hal tersebut dapat dicermati sejauhmana media menggiring opini publik melalui pemberitaan politik Pemilu pada 2013.

Menampakkan wacana kampanye politik yang terserap ke dalam teks-teks pemberitaannya, seperti pada tema “Rudiyanto Janjikan Pendidikan Gratis Di Sulsel” tema tersebut secara substansial bahwa paket Garuda’Na dalam kampanye politiknya akan memberikan pendidikan gratis jika terpilih menjadi Gubernur Sulsel, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat ambisi yang besar untuk merealisasikan program tersebut jika terpilih nantinya.

... Jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel, program pendidikan dan kesehatan gratis akan dilaksanakan pasangan Garuda'Na di Sulsel. Salah satu terobosan dalam pelaksanaan program kesehatan gratis dalam pemerintahan Rudiyanto-Andi Nawir yakni, satu dokter satu desa dan satu dusun satu bidan...

(Dokumentasi, 14/01/2013)

Realitasnya paket Garuda'Na dalam programnya memang menuai keberhasilan pada kepemimpinan Rudiyanto sejak priode pertamanya menjabat Bupati Sinjai pada tahun 2003 lalu, hingga terpilih kembali pada priode keduanya. Dua priode menjabat orang nomor satu di Sinjai, Rudianto telah mencapai keberhasilan dalam programnya. Hingga program unggulannya menjadi senjata pemungkas dalam kampanye politiknya.

Selanjutnya bentuk kampanye politik lainnya pada teks berita yakni konstruksi citra atau identitas, dalam teks berita tersebut mengindikasikan kemauan keras serta keseriusan paket Garuda'Na jika terpilih menjadi Gubernur. Keseriusan tersebut tampak pada teks berita di atas dengan mengumbar beberapa janji, seperti pada teks berikut.

... Program kesehatan gratis, pasien juga tidak akan dirawat lagi di ruang perawatan kelas tiga tetapi di ruang perawatan kelas dua," janji Rudiyanto.

... Rudiyanto juga menyoroti masih banyak pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan seperti jalan, jembatan dan irigasi yang belum tuntas.

... Untuk memecahkan persoalan infrastruktur diperlukan pemimpin yang serius bekerja dan paham persoalan yang dihadapi masyarakat

(Dokumentasi, 14/01/2013).

Konstruksi realitas Koran Sindo pada tema headline tersebut terlihat subjektif meskipun pada dasarnya tahap pemilahan dan pemilihan berita berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan aktivitas kampanye para kandidat Pilgub Sulsel 2013 yang direkonstruksi Koran Sindo menyajikan realitas bahwa paket Sayang tidak kooperatif dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU terkait dengan lokasi yang dimungkinkan untuk digunakan berkampanye.

Hal tersebut di atas terjabarkan dalam berita Koran Sindo yang berjudul "Sayang Ngotot Kampanye Di Lapangan Tamsis", di mana paket Sayang menunjukkan superioritasnya dengan cara menggunakan lapangan Taman Siswa (Tamsis) yang mestinya bukan tempat untuk ajang kampanye.

... Kendati sudah ada rekomendasi dari Panwaslu dan KPU Luwu Utara untuk tidak menggunakan lapangan Taman Siswa (Tamsis) sebagai ajang kampanye, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang II) mengabaikan rekomendasi tersebut...Rekomendasi Panwaslu ini langsung disikapi KPU Luwu Utara dengan melakukan koordinasi Polres Luwu Utara dan turun langsung memberikan pengertian agar tidak dilanjutkan kegiatan di tempat tersebut." Saya bersama lima komisioner KPU telah turun bersama aparat kepolisian memberikan pemahaman agar tidak melanjutkan kegiatan kampanye di lapangan Tamsis," ucapnya. Hanya saja, perintah penghentian kegiatan tersebut diabaikan tim kampanye Sayang II

(Dokumentasi, 12/01/2013)

Teks berita di atas dimaknai bahwa paket Sayang memiliki kekuatan politik untuk tidak tersentuh hukum, meskipun pihak KPU bersama aparat

kepolisian telah bertindak langsung di lapangan untuk menghentikan aktivitas kampanye, tetapi paket Sayang bahkan sama sekali tidak merespon peringatan tersebut yang mungkin juga disebabkan pengaruh euphoria ribuan pendukung SYL di lapangan Taman Siswa (Tamsis).

Sebagaimana yang diungkapkan dalam konstruksi teks Koran Sindo, paket IA (Rumah Rakyat) diwacanakan melakukan tindakan yang sama dengan agresifitas kampanye paket Sayang (Kapal Induk). Hal ini dapat dicermati dalam teks berita Sindo yang berjudul "Gerindra laporkan reklame IA ke Panwaslu".

Tak mengindahkan peringatan panitia pengawas pemilu, reklame raksasa pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahar Mudzakkar (IA) diprotes Partai Gerindra. Bahkan, Partai Gerindra melaporkan langsung masalah tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bone...Itu memang pelanggaran, setelah nanti menghasilkan kajian kita akan memanggil pihak terkait seperti KPU untuk pelanggaran administrasinya dan Polisi jika terbukti melanggar pidana," kata Rosmawati kepada wartawan di ruang kerjanya

(Dokumentasi, 22 Oktober 2012)

Demikian teks berita di atas menunjukkan agresifitas perilaku politik sebab tim sukses atau massa pendukung paket IA cenderung "melawan hukum" yang dibuktikan dengan pelanggaran atas regulasi PemiluKada tentang tata cara berkampanye. Pada kenyataannya paket IA juga tidak merespon peringatan Panwaslu hingga partai Gerindra akan memperkarakan kasus tersebut.

2. Counter Politik

Pemilukada disejumlah wilayah selalu ditandai dengan kampanye negatif oleh kandidat. Masing-masing kandidat bukan hanya menonjolkan diri sendiri tetapi juga membuat citra negatif kandidat lawan. Kampanye negatif ini ada yang dilakukan secara terang-terangan lewat kampanye terbuka, tetapi ada juga yang dilakukan secara tersembunyi, misalnya lewat selebaran atau percakapan dari mulut ke mulut.

Beberapa headline dari Koran Sindo mempublikasikan realitas Black Campaign masing-masing kandidat Pilgub Sulsel 2013, misalnya judul berita; “Black Campaign di Lutra terus berlanjut”, “Lakukan black campaign, dibayar Rp.500.000”, “Posko Cagub Sulsel Dilempar Bom Molotov”, “Pelaku black campaign di Soppeng diringkus polisi” dan “Jelang Pilgub-Toraja Waspada Teroris”.

Konteks isi berita yang dipaparan Koran Sindo cenderung berupaya “menyeimbangkan situasi” sebagaimana realitasnya terutama menguatnya rivalitas antara paket Sayang (Kapal Induk) versus paket IA (Rumah Rakyat) menunjukkan perilaku politik yang sama khususnya ketika pendukung atau tim sukses berkampanye banyak diwarnai dengan black campaign.

Misalnya terungkap pada berita “Lakukan black campaign, dibayar Rp 500.000,- “Pelaku black campaign di Soppeng diringkus polisi” dan berita berjudul “Black Campaign di Lutra terus berlanjut”.

Padahal, panitia pengawas pemilihan (Panwaslu) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didampingi aparat kepolisian telah menurunkan ribuan striker dan puluhan spanduk yang bertuliskan tolak Gubernur Narkoba. Tim pasangan calon Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang II) Basir sudah melaporkan kasus dugaan black campaign tersebut ke panitia pengawas pemilihan (panwaslu) kabupaten Luwu Utara. Laporan Basir diterima anggota panwaslu Luwu Utara divisi pelaporan dan tindak lanjut Sri Wati Sukama Deningsi. Basir didampingi dua pengurus Golkar Luwu Utara mendesak Panwaslu dan unsur terkait agar segera mengambil langkah konkret guna mengantisipasi adanya eksekusi dari penyebaran stiker dan spanduk yang mendiskreditkan SYL

(Dokumentasi.08/11/2012).

Keterangan teks berita di atas, tampak bahwa rival SYL atau oknum tertentu secara sengaja melakukan-menyebarakan isu-isu negatif (negative campaign) melalui instrumen kampanye seperti stiker dan spanduk yang isinya bermakna “pembunuhan karakter” agar masyarakat tersugesti untuk tidak memilih SYL pada Pilgub Sulsel 2013.

Lewat teks berita yang berjudul “Jelang pilgub, Toraja waspada teroris”, *Koran Sindo* mencoba menyeimbangkan wacana agar tampak bagi pembaca bahwa memang media ini tidak berpihak atau dalam posisi netral dan berimbang dalam menyajikan berita. Berikut adalah sampel teks berita (“Jelang Pilgub, Toraja Waspada Teroris”) yang secara “implisit” memaparkan kondisi paket IA yang juga mengalami serangan black campaign dari pihak lawan atau oknum tertentu.

.....Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mewaspadaai peluang teroris menyusup saat pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel. Hal itu dilontarkan Bupati Tana Toraja saat rapat dengan para

camat dan kepala desa/lurah se kabupaten Tana Toraja di ruang pola kantor bupati...Tidak menutup kemungkinan, teroris akan kembali mengancam Toraja dengan cara menyusup saat pemilihan gubernur mendatang..."Teroris musuh kita bersama. Kita harus tetap bersatu melawan teroris dengan menjaga wilayah masing-masing

(Dokumentasi, 15/01/2013)

Jika dicermati *Koran Sindo* cenderung "mengalihkan isu" dan "memperhalus bahasa" terutama penekanan kata "Teroris" dan kalimat "... Teroris musuh kita bersama". Dalam konteks politik, sesungguhnya penggunaan kata "Teroris" pada berita di atas tidak lain ditujukan kepada paket IA. Sudah menjadi "rahasia umum" bahwa secara geopolitik, Kabupaten Tana Toraja adalah basis massa/konstituen SYL yang sudah dapat dipastikan dominasi keberpihakan masyarakat terutama para tokoh masyarakat (*Opinion Leader*) yang direpresentasikan *Koran Sindo*.

Demikian pula sudah umum diketahui bahwa historitas Pilgub Sulsel 2013 mewacanakan rivalitas antara paket Sayang jilid II dan paket IA, dimana dalam proses kampanye paket Sayang banyak dicitrakan oleh rivalnya dengan cara black campaign sebagai "Gubernur Narkoba" dan paket IA sebagai "Teroris".

3. Polarisasi Konstituen

Wacana politik dalam pemberitaan koran Sindo tentang Pilgub Sulsel 2013 dikonstruksi dengan memberi penekanan pada polarisasi partai (koalisi parpol pendukung) dan konstituen atau massa pendukung yang dilatarbelakangi oleh isu etnosentrisme/primordialisme di antara kandidat Pilgub Sulsel 2013.

Implikasi dari polarisasi konstituen ini lebih cenderung negatif, dengan melihat realitas konflik sosial yang terjadi seperti kerusuhan atau bentrok fisik antar massa pendukung kandidat. Beberapa teks berita Koran Sindo yang memaparkan peristiwa tentang konflik pasca Pilgub Sulsel 2013 yaitu; “Kecewa hasil Pilgub, pendukung Ilham ricuh”, “Bentrok Antar Pendukung Cagub Sulsel Kembali Pecah”, “Pengambilan nomor urut Pilgub Sulsel ricuh” dan “Bentrok Pemilukada, JK anggap biasa”.

.... Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau kepada masyarakat Sulsel agar menerima keputusan KPU yang memenangkan pasangan Cagub Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang. Sedangkan bentrokan yang terjadi kemarin di Makassar, JK menganggap hal itu biasa dalam Pemilukada ... JK menilai dengan adanya bentrokan yang terjadi di Makassar pada Kamis kemarin adalah hal yang biasa dalam Pemilukada yang merupakan ungkapan kekecewaan pendukung dengan hasil keputusan ...

(Dokumentasi, 01/02/2013)

Berdasarkan keterangan berita di atas “Bentrok Pemilukada, JK anggap biasa”, diketahui bahwa terjadinya kerusuhan massa pendukung kandidat bukan saja karena ditengarai adanya oknum provokator, melainkan sebagai ungkapan kekecewaan pendukung dengan hasil keputusan KPU atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pihak lawan.

Demikian pula dengan teks berita yang berjudul “Kecewa hasil Pilgub, pendukung Ilham ricuh”, menunjukkan reaksi negatif massa pendukung pasca Pilgub Sulsel 2013:

Sekitar seribu massa pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Ilham Arif Sirajuddin-Aziz Kahar Mudzakkar mengamuk di Makassar. Mereka kecewa dengan hasil Pemilihan Gubernur Sulsel yang dinilainya sarat kecurangan ... Dalam konvoi tersebut massa membakar sebuah sepeda motor milik warga yang terdapat stiker kandidat lainnya, di Jalan Pattimura Makassar. Aparat kepolisian yang ada di lokasi tak mampu mencegah aksi pembakaran tersebut..

(Dokumentasi, 31/01/2013)

Lebih dari uraian fakta yang disajikan Koran Sindo di atas, kekecewaan masyarakat, khususnya simpatisan para kandidat Pemilukada sesungguhnya lebih cenderung didasari atas proses pelaksanaan Pemilukada (mekanisme prosedural) yang dianggap tidak beres, banyak dipermainkan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih kemenangan di Pilgub Sulsel 2013.

4.3. Kecendrungan Konstruksi Media Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pilgub Sulsel 2013

Level makro yakni konteks sosial (Sosiokultural), penulis mengfokuskan pada wacana berdasarkan segmentasi perilaku pemilih dengan menganalisis data yang berkaitan dengan dominasi kandidat pasangan Sayang, IA dan Garuda'Na. Relasi aktor politik diantaranya Partai Politik, kelompok atau organisasi dan struktur sosial yaitu kelas sosial terkait pemilihan kepala daerah Sulsel 2013.

Segmentasi perilaku pemilih meliputi perilaku primordialisme, perilaku rasional kalkulatif, perilaku emosional dan perilaku sosial. Segmentasi perilaku pemilih menjadi acuan melihat kecendrungan media dalam memberitakan aktor politik dan dominasi kandidat. Berikut reduksi data berdasarkan multivarian headline yang berkaitan tentang kecendrungan konstruksi teks terhadap pemilih. Hasil reduksi berita dengan segmentasi pemilih dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Segmentasi Pemilih Dan Reduksi Headline

Konteks Sosial		Reduksi Wacana	Publikasi
Segmentasi Pemilih	Relasi Aktor Dan Dominasi		
Perilaku Primordialisme	1. Komunitas Dan Dominasi Etnisitas (Sayang) 2. Komunitas Dan Dominasi Islamisme (IA)	1. Tim Syl: Hingga Tetes Darah Penghabisan 2. Ilham Bentuk Tim Pejuang Perempuan (TPP) 3. Tarawih Dari Kelurahan KeKelurahan Aziz Tausiyah & Dengar Keluhan Pedagang 4. Aco: Jangan Ulang Kekalahan Amin Syam	1)Tribun Timur, (02/05/2012) 2)Tribun Timur, (18/05/2012). 3)Rakyat Sulsel, (31/06/2012) 4)Tribun Timur (05/12/2011)

Perilaku Rasional Kalkulatif	1. Program Unggulan (Sayang) 2. Karya Pembangunan (IAS)	1. Pemuda Dan Mahasiswa Jadi Relawan Sayang. 2. Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Kembali Jadi Jualan 'Sayang' 3. Ilham, Jangan Pilih Calon yang Tidak Punya Karya 4. Rudiyanto Janjikan Pendidikan Gratis Di Sulsel	1)Koran Sindo (14/06/2012) 2)Rakyat Sulsel (04/06/2012) 3)Tribun Timur (11/09/2012) 4)Koran Sindo (14/01/2013)
Perilaku Emosional	1.Relasi Antara kepala Daerah Dan Aktor Politik (Partai Golkar) 2.Relasi Antara Tokoh Agama, Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarakat	1. Ok Community Toraja Berjuang Menangkan Sayang 2. IAS Makin Mesra Dengan Tokoh Takalar 3. Demokrat Dominasi Kampanye AMAN Di Takalar 4. Maddusila Siap Menangkan IAS-AZIZ Di Gowa, Jennepono 5. Bupati Pinrang Dukung Agus Kembali Dampingi Syahrul	1)Rakyat Sulsel (12 Juli 2012) 2)Tribun Timur (15/08/2012) 3)Rakyat Sulsel (30/09/2012) 4)Tribun Timur (25/03/2012)
Perilaku Sosial	1.Relasi kelompok kepentingan (KNPI) 2.Relasi Kelompok Kepentingan (KPPSI)	1. KNPI Sulsel Dukung Pasangan "Sayang" 2. Berpolitik Praktis, Ketua KNPI "Offside" 3. SYL Rekrut Pengurus ORARI 4. KPPSI (Komite Perjuangan Pene-gakan Smyariat Islam) Dukung Paket Ilham-Aziz Kahar	1)Rakyat Sulsel (07/01/2012) 2)Tribun Timur (09/01/2012) 3)Tribun Timur (15/03/2012) 4)Tribun Timur (04/07/2011)

Arsip Redaksional Rakyat Sulsel, Tribun Timur Dan Sindo 2013

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menampakkan dukungan aktor politik yaitu partai politik, kelompok atau organisasi dan relasi politik kandidat atas aktor politik yang bertujuan mempertahankan dominasinya, diantaranya pasangan incumbent Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu'mang (Sayang), pasangan petahana Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir

Pasinring (Garuda-Na). Masing-masing kandidat tentunya memiliki popularitas tersendiri di masyarakat. Elit politik terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

Kekuasaan sebagai sebuah tujuan, konsep yang diutarakan Niccolo Machiavelli sejalan dengan situasi politik pada Pilgub Sulsel 2013. Masing masing kandidat melakukan segala cara untuk mempertahankan dominasinya mencapai tujuan tertentu, diidentifikasi bahwa pasangan Sayang bertujuan mempertahankan politik kekeluargaan, pasangan IA bertujuan pada orientasi nasionalis-religiusnya sedangkan pasangan Garuda-Na pada identitas etnis bugis karena keduanya berasal dari keturunan bugis bangsawan. Lebih lanjut Niccolo Machiavelli menunjukan sejauh mana seorang elit politik mempunyai taktik dan strategi yang tidak lepas dari namanya lawan politik lainnya (Gramsci, 2013: 185).

A. Segmentasi Perilaku Primordialisme

Perilaku primordialisme merupakan perilaku pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap leluhur dan banyak berdomisili di perkampungan.

Ikatan etnisitas sebagai simbol identitas kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan menarik dukungan komunitas

etnis dalam proses dominasi praktek politik lokal. Praktek elit politik etnis yang didukung oleh modal ekonomi, sosial, simbolik dan budaya yang melekat masing-masing elit disetiap etnis secara kesejarahan. Hal tersebut seharusnya dapat membantu kemajuan kelompok disetiap etnis, namun pada kenyataan b elum menjamin kesejahteraan kelompok etnis.

1. Geopolitik Etnisitas Dan Relasi Politik (Pasangan Sayang)

Hakekat etnisitas masyarakat Sulsel sebenarnya dapat ditelusuri dalam lontara' yang mengurai kedigjayaan tiga kerajaan paling berpengaruh didaratan Sulsel, yakni Luwu, Bone dan Gowa, dengan simbolisasi dalam peristilahan "tellu boccoe", Pajung ri Luwu, Mangkau ri Bone dan Somba ri Gowa.

Konteks histori menandakan adanya struktur sosial yang membagi tiga golongan kerajaan. Sehingga hal tersebut merupakan perhatian setiap kandidat dalam menggalang dukungan untuk melestarikan kekuasaannya. Menurut Gramsci (1999) hegemoni tak dapat dipisahkan dari konteks historis yang memosisikan kelompok dominan sehingga mampu menimbulkan keyakinan sejumlah besar orang terhadap posisi kelompok dominan (Eni Maryani, 2011: 53).

Eksistensi Syahrul Yasin Limpo merupakan simbolisasi Somba ri Gowa sangat berpengaruh di Sulsel pada umumnya dan di Gowa pada khususnya. Kesuksesan sebagai Pemprov Sulsel dan Pemda Gowa. Hal yang serupa diperoleh oleh Agus Arifin Nu'mang yang juga berpengaruh di Sulsel disebabkan wakil dari Syl sebagai Pemprov di Sulawesi Selatan.

Kedua hal tersebut menampilkan identitas kandidat yang memiliki struktur sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Kedekatan etnisitas Sayang merupakan relasi kekuasaan di antara etnis dan merupakan strategi yang bertujuan, apalagi masyarakat yang terdapat di Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto yang notabene mayoritas suku Makassar, Hal ini merupakan strategi pendekatan etnisitas kedaerahan dan merupakan kesuksesan Syl pernah menjadi kepala daerah yang merupakan bentuk cerminan keberhasilan di Makassar.

Berdasarkan relasi kekuasaan tersebut berikut data wacana yang berjudul "*Tim Syl: Hingga Tetes Darah Penghabisa*" sebagai berikut :

...Relawan kandidat calon gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Communication Community (SYL CC) menyatakan kesetiannya mendukung Syahrul di Pemilihan Gubernur Sulsel 2013 nanti.

....Wujud kesetiaan SYL CC terhadap Syahrul akan dibuktikan dengan ikut bertanggung jawab memenangkan Syahrul di Pilgub Sulsel hingga tetes darah penghabisan. Syahrul melantik relawan SYL CC Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto di Rumah jabatan Bupati Bulukumba...

(TB,02/05/2012)

Menampilkan eksistensi komunitas yang bertujuan memenangkan pasangan Sayang, kelompok tersebut merupakan komunitas yang telah di bentuk kemudian dinamakan Syl CC. Strategi politik Syahrul Yasin Limpo dengan membentuk komunitas di daerah khususnya diwilayah Selatan Sulsel, merupakan komunitas yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasinya.

Seorang elit politik mempunyai taktik dan strategi yang tidak lepas dari namanya lawan politik lainnya (Gramsci, 2013). Taktik dan strategi upaya dalam melestarikan kekuasaan incumbent dengan memanfaatkan media informasi sebagai kampanye politiknya, relasi kekuasaan aktor politik atas institusi media merupakan eksploitasi terhadap informasi yang sarat atas kepentingan tertentu. Dan diidentifikasi bahwa relasi politik di ruang redaksi Koran Lokal tersebut di sebabkan adanya kedekatan struktur internal media dan struktur partai politik secara eksternal mempengaruhi rutinitas media.

Dominasi Sayang dapat di bagi dalam tiga bentuk dominasi yaitu, dominasi terhadap komunitasnya, dominasi terhadap media Informasi dan dominasi terhadap etnisitasnya. Dominasi kelompok minoritas atas kelompok mayoritas dengan melalui upaya politik, ekonomi dan budaya sehingga ide kelas penguasa dilihat sebagai norma, mereka dipandang sebagai ideologi universal, dianggap menguntungkan semua orang, namun sebenarnya menguntungkan kelas penguasa (Gramsci, 1999).

2. Orientasi Religius Dan Relasi Politik (Pasangan IA)

Sebagaimana dominasi pasangan Sayang (incumbent) atas etnisitasnya, hal yang serupa terjadi pada pasangan Ilham-Aziz sebagai kandidat petahana, Eksistensi Ilham sebagai kandidat Pilgub Sulsel 2013 berpengaruh di masyarakat khususnya di Sulsel, hal ini karena prestasi dan popularitasnya sebagai Walikota di kota Makassar. Hal serupa

dialami Aziz yang memiliki kharisma tersendiri, karena pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua Komite Penegakan Syariat Islam.

Berkaitan dengan segmen primordial, keberadaan Aziz begitu diperhitungkan, disebabkan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan kandidat lainnya yaitu orientasi religiusnya, upaya penegakan syariat Islam khususnya di Makassar menuai respon positif khususnya lembaga, Institusi, universitas dan pesantren yang basisnya adalah Islam .

Dominasi ini terjadi ketika relasi kandidat atas aktor politik terjadi, yakni kelompok muslimah sebagai bentukan komunitas Ilham-Aziz yang berkeinginan memperjuangkan penegakan syariat Islam, hingga komunitas atau kelompok dinamakan Tim Pejuang Perempuan (TPP). Sebagaimana pada wacana yang berjudul "*Ilham Bentuk Tim Pejuang Perempuan*" sebagai berikut:

.... Tim Pejuang Perempuan (TPP) pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Kahar Muzakkar (IA) dijadwalkan menggelar pelantikan di Aula STIE Nobel, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Jumat (18/5/2012) Rencananya pelantikan didaulat salah seorang tokoh pejuang muslimah, Sabriati Abdul Aziz Kahar Muzakkar, Hingga pukul 09.10 wita, puluhan TPP tampak berdatangan di aula tersebut. Mereka hadir mengenakan pakaian Muslimah, TPP umumnya berasal dari kalangan mahasiswa dan ibu Majelis Taklim, Adapula perempuan legislator dari DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar...

(TB, 02/05/2012)

Pengaruh orientasi Aziz memperlihatkan begitu solidnya antara aktor politik ketika menghadiri pelantikan kelompok ini, hal tersebut karena di hadir kelompok mahasiswi, kelompok Ibu Majelis Taklim, dan Legislator

DPRD Makassar dan Sulsel. Relasi sosial antara aktor politik mencerminkan relasi politik kekuasaan dan dominasi pasangan Ilham-Aziz sebagai petahana.

Dominasi petahana secara kongkrit dibuktikan bahwa terdapat peran politik kandidat membentuk kelompok atau komunitas yang sarat dengan kepentingan ideologi Islamisme Aziz. Hal ini berkaitan dengan strategi kelompok dominan menyampaikan orientasinya dengan menggunakan perangkat kekuasaan dan dominasinya yaitu melalui kelompok atau komunitasnya, juga merupakan bentuk relasi antara aktor aktor politik.

Sebagaimana dominasi pasangan Sayang, bentuk dominasi pasangan IA juga terbagi dalam tiga bentuk dominasi, yaitu dominasi atas komunitasnya, dominasi atas media informasi dan dominasi atas kelompok muslimah. Pandangan ini menekankan bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama yang menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara- cara tertentu .

B. Segmentasi Rasional Kalkulatif

Pemilih rasional kalkulatif adalah memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan, selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang

dimiliki dari seorang kandidat. Menurut Eep Saifullah (Efriza, 2012) pemilih tersebut memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika, dan biasanya berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan.

1. Program Unggulan Dan Relasi Politik (Pasangan Sayang)

Berkaitan dengan segmen rasional kalkulatif, yaitu janji politik incumbent yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan gratis, Janji politik tersebut telah menjadi program unggulannya hingga membawanya sebagai kandidat terpilih pada priode pertama, sehingga pada priode kedua (Incumbent) kandidat pasangan Sayang menawarkan kembali program tersebut.

Keunggulan program pemerintah mencapai puncak keberhasilan ketika kelompok pemuda dan mahasiswa memberikan respon positif hingga pada pemberian dukungan kepada pasangan incumbent, kedua kelompok pada dasarnya sarat atas keinginan dan kepentingan tertentu, yaitu keinginan untuk mendapatkan pendidikan. Relasi politik tersebut terjalin akibat kebutuhan mahasiswa atas pendidikan yang menjadi program yang ditawarkan pasangan incumbent terhadap masyarakat khususnya kelompok mahasiswa. Menurut Imam Hidayat (2009, 31) bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber tersebut seperti mahasiswa, elit politik, media, tokoh masyarakat maupun militer.

Dominasi terjadi ketika pasangan incumbent telah menguasai sumber-sumber kekuatan dengan tujuan melagengkan kekuasaannya, di samping menguasai kelompok mahasiswa dan pemuda. Juga terjadi hegemoni terhadap kaum intelektual dengan janji janji politik incumbent, hingga akhirnya tidak sedikit mahasiswa mendukung program tersebut. Seperti dalam wacana yang berjudul "*Pemuda dan Mahasiswa Jadi relawan Sayang*" sebagai berikut :

...Tim relawan ini merupakan komunitas pemuda dan mahasiswa di Kota Makassar. "Dua tim relawan ini adalah komunitas pemuda dan mahasiswa yang akan berjuang untuk memenangkan Pak Syahrul dan Pak Agus di pilgub nanti," ujar Ketua Panitia Pelantikan Relawan Sayang jilid II Nahrul Khayat, kemarin. Dia mengaku, pengurus anggota Noname Community dan Brain Community sebagian besar adalah mahasiswa yang tersebar di seluruh perguruan tinggi di Kota Makassar. Seperti penerapan pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP yang akan ditingkatkan hingga ke SMA dan mulai berlaku tahun ini. "Di bidang kesehatan, ada kesehatan gratis. Tentunya ini semua harus dilanjutkan," katanya.....

(Sindo, 14/07/2012)

Relasi aktor politik incumbent terhadap kelompok mahasiswa menjadikannya membentuk komunitas yang didominasi oleh kelompok mahasiswa di Makassar, komunitas tersebut adalah kelompok atau relawan yang dinamakan Noname Community dan Brain Community, hal ini dapat di asumsikan bahwa adanya bentuk dominasi satu kelas yang menguasai (superordinasi), satu kelas yang di kuasai (subordinasi). Eksistensi kelompok mahasiswa sebagai pendukung Sayang merupakan kelompok yang menginginkan pendidikan gratis, dan bukan hanya

mahasiswa yang ada pada komunitas Sayang akan tetapi mahasiswa secara keseluruhan bisa juga disebut dengan kelompok berkepentingan.

Menurut Giddens (1986), ketika kelas dominan mengambil alih bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasinya, maka saat yang sama kelas dominan akan mempunyai kendali atas sarana produksi intelektual, sehingga secara umum, gagasan pihak yang tidak mempunyai sarana produksi intelektual menjadi terakomodasi oleh sarana tersebut. Akhirnya, kesadaran dalam masyarakat ditentukan oleh kelas dominan.

2. Karya Pembangunan Kota Dan Relasi Politik (IAS)

Keberhasilan dan prestasi Ilham sebagai Walikota di Makassar membawa banyak perubahan dalam infrastruktur kota yang telah dirasakan masyarakat di kota Makassar, Lapangan Karebosi, Pusat perbelanjaan Karebosi Link di bawahnya, Anjungan Pantai Losari dan Masjid Terapung. Keberadaan Ilham Arif Sirajuddin ini patut di pertimbangkan, karena popularitas dan elektabilitasnya sangat berpengaruh di mata masyarakat Sulsel. Sebagaimana pada wacana berjudul "*Ilham: Jangan Pilih Calon Yang Tidak Punya Karya*"

....Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin mengajak masyarakat untuk tidak memilih kandidat gubernur dan wakil gubernur yang tidak punya karya pembangunan.

.... Ajakan itu disampaikan Ilham dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Makassar saat mengukuhkan 70 ketua RW dan 387 ketua RT dari enam kelurahan se-Kecamatan Manggala, di Gedung Al Mubarak, di Jl Tamangapa Raya, Ilham menunjuk beberapa di antara karya nyatanya selama dua periode, yakni Lapangan Karebosi dan pusat perbelanjaan Karebosi Link di bawahnya, anjungan Pantai Losari sebagai ruang publik yang gratis, serta

Masjid Terapung yang merupakan ikon baru Kota Makassar..

(TB,11/09/ 2012)

Relasi politik Ilham dengan beberapa ketua RW dan RT merupakan relasi dalam konteks lembaga pemerintahan, posisi Ilham sebagai Walikota berwenang melantik atau mengukuhkan RW dan RT. Menurut Weber bahwa dominasi pihak yang berkuasa mempunyai wewenang sah untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pihak yang dikuasai wajib mentaati kehendak penguasa.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan Ilham Arif Sirajuddin sebagian pasangan calon momentum Pemilukada Sulsel 2013 dengan mengajak masyarakat memilih calon yang punya karya yang nyata. Lebih lanjut Max Weber (2012, 73) menegaskan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu, kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat.

C. Segmentasi Perilaku Emosional

Pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya (Nursal, 2004). Berdasarkan konsep tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa faktor pemilih emosional ini, ditentukan oleh relasi aktor politik yaitu partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

1. Dominasi Dan Relasi Aktor Politik (Pasangan Sayang)

Dominasi kandidat pada hakikatnya tidak hanya diperlihatkan dalam konteks primordial semata. Tetapi, juga diperlihatkan antara relasi aktor politik seperti partai politik, kelompok dalam struktur sosial. Eksistensi kader partai Golkar di berbagai daerah semakin mempermudah sosialisasi politik incumbent terkait dengan kesuksesan program Pemprov Sulawesi Selatan pada priode pertama.

Kedekatan kader Partai Golkar di setiap daerah mengindikasikan adanya relasi politik pasangan Sayang antara kepala daerah yang bertujuan mendukung pasangan Sayang, kelompok atau komunitas yang telah dibentuk Syl yang dinamakan OK Community melakukan touring di setiap daerah yang bertujuan melestarikan kekuasaan pasangan Sayang.

Keberadaan kader Partai Golkar (aktor politik) yang ada di setiap daerah merupakan kekuatan politik Sayang, di satu sisi Syl merupakan mantan sekretaris DPP Golkar dan disisi yang lain keberhasilan Cabup yang terpilih yang di usung oleh Golkar seperti di Tana Toraja yaitu Theofilus Allorerung dan di Luwu yaitu Ir. H. Andi Muzakkar adalah ketua DPC Partai Golkar yang terpilih.

Sebagaimana pada wacana yang berjudul "*Ok Community Toraja Berjuang Menangkan Sayang*"

....Bupati Tana Toraja Theofilus Alloreng mendukung keberadaan komunitas Oto Komandan dan Motor Komandan (OK) Community, salah satu tim pemenang incumbent Syahrul Yasin Limpo di Pilgub Sulsel mendatang.

....“Saya siap memback up kegiatan- kegiatan yang dilakukan pengurus OK Community di Tana Toraja sepanjang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Theofilus saat menghadiri pengukuhan pengurus OK Community Tana Toraja di Gedung Wanita, Kota Makale, Selasa (10/7).

(HRS, 12/06/2012)

Relasi kader Golkar dengan komunitas Syl di Luwu, berikut

wacananya:

....Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, yang menerima kunjungan touring anggota Oto Komandan menyambut positif kehadiran OK Community Sulawesi Selatan di Luwu. “Saya menyampaikan selamat datang di kabupaten Luwu, semoga tetap dalam kondisi yang baik setelah menempuh perjalanan panjang menuju Luwu,” Kata Andi Mudzakkar kala itu. Selain di Kabupaten Luwu, Redindo juga mengukuhkan anggota Oto Komandang di Malili Lutim, Kota Palopo, dan di Luwu Utara.

(HRS, 12/07/2012)

Ok komunity adalah kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh pasangan Sayang yang bertujuan untuk memenangkan Sayang. Relasi kandidat antar komunitas tersebut merupakan bentuk dominasi pasangan calon atas komunitasnya. Dominasi memperlihatkan adanya superordinasi kelas dan subordinasi kelas yakni subordinasi ini berupa ketaatan atau ketundukan pada superordinat yang berkedudukan lebih tinggi (Simmel, 1890). Konsep tersebut berkaitan dengan dominasi Syl atas komunitasnya yang dikenal dengan peristilahan majikan dan pelayannya.

Pemanfaatan perangkat kekuasaan bertujuan melanggengkan kekuasaan dan dominasi dengan menggunakan wacana Koran Harian

Rakyat Sulsel sebagai instrumen kekuasaannya, Data wacana diatas membuktikan kecendrungan pasangan Sayang, Hingga peran media informasi khususnya Koran Harian Rakyat Sulsel masih berada dalam kontrol penguasa dan bertolak belakang dari UUD kebebasan Pers.

2. Dominasi Dan Relasi Aktor Politik (Pasangan IA)

Sebagaimana relasi politik Sayang terhadap aktor politiknya, juga terdapat relasi politik IA terhadap komunitasnya, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Relasi antara aktor politik menampilkan dominasi IA atas kelompok tertentu. Imam Hidayat mengatakan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan orang tertentu memanfaatkan sumber kekuatan yang menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber itu adalah elit politik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sebagaimana pada wacana yang berjudul "*IAS Makin Mesra Dengan Tokoh Takalar*", yaitu :

....Sembari menunggu Azan, Ilham dan rombongan bersilaturahmi di kediaman tokoh masyarakat setempat, Mangung Dg Buang.

....Pekan lalu Wakil Bupati Takalar Makmur Andi Sadda memperkenalkan IAS sebagai kandidat Gubernur Sulsel kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tim suksesnya.

...."Ingatki nah, Inimi calon gubernur," kata Makmur kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tim suksesnya berbadan kekar di depan rumah jabatan Wakil Bupati Takalar....

.....Hadir dalam silaturahmi tersebut sejumlah tokoh masyarakat Takalar di antaranya Kepala Kantor Agama Makassar Abdul Wahid, aktivis perempuan Zohra A Baso, dan empat ketua lembaga adat Takalar yakni Ketua Lembaga Adat Karaeng Galesong, Karaeng Polombangkeng, Karaeng Sanrobone, dan Karaeng Laikang....

(TB, 13/01/ 2012)

Relasi politik IA dengan beberapa kelompok diantaranya aktifis perempuan, tokoh masyarakat dan beberapa lembaga adat, menampakkan dominasi IA terhadap kelompok dan organisasi, kedekatan personalitas IA di sebabkan popularitas Ilham dan Aziz. Relasi politik IA dan beberapa aktor politik adalah sebagai bentuk kerja sama untuk memenangkan pasangan IA pada Pilgub Sulsel 2013. kelompok ini sebetulnya syarat atas kepentingan tertentu, misalnya kelompok aktifis perempuan dan tokoh agama yaitu adanya kesesuaian keinginan kelompok dan kontrak politik yang di tawarkan pasangan IA.

Kontrak politik pasangan IA dengan mewujudkan masyarakat yang bermoral merupakan ideologi politik yang bertujuan mempertahankan dominasinya, dominasi dari satu kelompok sosial atas yang lain, seperti kelas penguasa atas semua kelas lainnya. Menurut Gramsci mengklaim ide kelas penguasa dilihat sebagai norma, mereka dipandang sebagai ideologi universal, dianggap menguntungkan semua orang, namun sebenarnya hanya menguntungkan kelas penguasa (Ginting, 2012: 48)

D. Segmentasi Perilaku Sosial

Perilaku sosial merupakan kelompok atau organisasi yang mengasosiasikan kontestan Pemilu dengan kelompok kelompok sosial dalam menentukan pilihan politiknya, kelompok sosial ini dikategorikan organisasi yang berorientasi masyarakat dengan ideologi berbeda.

Organisasi sosial pada dasarnya memiliki orientasi yang sama yaitu memasyarakatkan masyarakat, hal yang membedakan adalah orientasi

ideologisnya, sebagai contoh adalah KNPI merupakan organisasi yang berorientasi pada pemuda, bangsa dan negara, sedangkan KPPSI adalah organisasi yang berorientasi pada agama yaitu Islam.

1. Relasi Aktor Politik (KNPI) Dengan Pasangan Sayang

Dukungan organisasi masyarakat terhadap kandidat pada dasarnya merupakan suatu kewajiban apabila untuk kemaslahatan masyarakat, terlebih apabila kandidat telah menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan atau maksud tertentu untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip organisasi yang berorientasi masyarakat.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah organisasi yang menghimpun semua organisasi kepemudaan (OKP) yang bertujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda. Salah satu orientasinya adalah memberdayakan pemuda dan organisasi pemuda (OKP). Salah satu upaya pemberdayaan dilakukan dengan pendidikan kepada pemuda.

Eksistensi organisasi pemuda (KNPI) merupakan bentuk kekuatan politik pasangan Sayang, yang tidak lain diklaim mendukung pasangan Sayang, sebagaimana pada wacana yang berjudul *“KNPI Sulsel Dukung Pasangan SAYANG”* sebagai berikut :

.... Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan dukungan kepada Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang *Sayang* untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 ..

(HRS, 07/01/2012)

Keberadaan organisasi (KNPI) pendukung Sayang memperlihatkan relasi kelompok/organisasi terhadap pasangan Sayang, dukungan tersebut kelihatan wajar disebabkan Aan (Cawagub) pernah menjadi wakil ketua DPD KNPI TK-1 pada priode 1994 – 1999 dan juga ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Sulsel 1999 – 2004.

Selain itu juga, sebetulnya terdapat kepentingan pribadi, yaitu saat kunjungan ketua KNPI Jamaluddin Syamsir pasca Pilgub diruang kerja Gubernur terpilih pada 22 Oktober 2013 untuk menggelar (Musprov) pemilihan ketua KNPI Priode 2013 - 2016, dan pencalonan Jamaluddin Syamsir pada bursa (Caleg) di Dapil V Bulukumba, Sinjai dengan mengendarai Partai Golkar.

Eksistensi organisasi ini, sebetulnya sarat atas kepentingan yaitu dukungan kepada pasangan Sayang untuk melanjutkan program pemerintah terkait pendidikan gratis, tujuan dan keinginan organisasi ini merupakan faktor adanya relasi politik pasangan Sayang terhadap kelompok atau organisasi yang berkepentingan yaitu KNPI Sulsel.

2. Relasi Aktor Politik (KPPSI) Terhadap Aziz

Konfigurasi Idiopolitik Ilham-Aziz bisa disebut pasangan Nasionalis Religius. Sebutan pasangan Nasionalis Religius dikarenakan dalam diri Ilham mengalir kuat paham nasionalis, Ilham seorang anak dari pasangan Arif Sirajuddin dan Hj. Djohra, ayahnya yang berkecimpung di dunia kemiliteran sudah pasti berfaham nasionalis sementara istri Ilham Aliyah Mustika adalah anak ketiga dari Letnan Kolonel (Purn) Ali Abdullah.

Sementara Aziz Qahar Muzakkar adalah Anggota DPD-RI selama dua priode, Ketua Umum Tanfidsiyah KPPSI yang tidak lain adalah putra "patriot-pemberontak" DI/TII, Abdul Qahhar Mudzakkar yang sampai saat ini masih saja tetap memiliki kharisma di sejumlah wilayah di Sulsel, Jadi Ilham-Aziz disebut pasangan Nasional Religius. hegemoni tak dapat dipisahkan dari konteks historis yang memosisikan kelompok dominan sehingga menimbulkan keyakinan sejumlah besar orang terhadap posisi kelompok dominan (Gramsci,1999).

Relasi politik Aziz terhadap kelompoknya merupakan bentuk kerja sama dalam memperjuangkan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam wacana dengan judul "*KPPSI Dukung Paket Ilham-Aziz Kahar*" sebagai berikut :

.....Sekertaris majelis syuro Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) HM Siradjuddin mendukung ketua KPPSI Abdul Azis Kahar Musakkar berpaket dengan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pada pilkada Kota Makassar 2013 mendatang.

....Dukungan sekertaris Forum Umat Islam (FUI) tersebut disampaikan saat ditemui Tribun di kantornya, Jl Toddoppuli, Makassar, Kamis (04/08/2011)

(TB,04/08/2011)

Relasi antara aktor politik yaitu tokoh agama merupakan strategi menampilkan dominasi pasangan ini, apa lagi dengan identitas Aziz yang cenderung berorientasi Islamisme, setiap manusia terikat dalam lingkaran sosialnya seperti etnisitas dan agama. Faktor agama ini yang dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat dalam mempengaruhi keputusan pemilih (Simmel, 1890).

Eksistensi KPPSI berpotensi akan mendorong dukungan massa khususnya masyarakat yang menyukai orientasi islamisasi Aziz Kahar, kelompok sosial seperti organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah dan sejenisnya bisa masuk dalam kategori ini. Manifestasi Islamisme yang disebutkan sama-sama berjuang untuk menciptakan masyarakat berbasis hukum.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan terkait hegemoni politik dalam diskursus Pemilikada Sulsel 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Konstruksi tekstual menunjukkan kandidat menjadikan koran sebagai alat kampanye politiknya Koran Harian Rakyat Sulsel berpihak kepada SYL, Koran Tribun Timur berpihak IAS, Koran Sindo menyajikan keseragaman isu politik pasangan calon.

Praktik diskursus ekonomi politik media, Koran Rakyat Sulsel dan Koran Tribun Timur menunjukkan relasi terhadap aktor politik, partai politik tertentu, proporsi berita bersifat tendensius dan pemilahan narasumber berprofesi politisi dibanding akademisi yang netral. Sedangkan Koran Sindo dalam praktiknya lebih pada keseragaman isu politik, penggunaa narasumber berprofesi akademisi.

Kecendrungan wacana menunjukkan pemilih primordialisme pada dominasi Syl atas etnisitasnya dan Aziz atas komunitas muslimah, pemilih rasional kalkulatif menunjukkan dominasi mendukung program unggulan Sayang dan karya pembangunan IAS, perilaku emosional menunjukkan relasi antar aktor politik seperti bupati, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dan pemilih sosial menunjukkan dukungan kelompok sosial seperti KNPI dan KPPSI sebagai kelompok atau organisasi yang berkepentingan.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian diatas terdapat beberapa saran yang diajukan pada penelitian ini. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah dan regulator media, di harapkan adanya aturan terhadap institusi media menjadi lembaga pendidikan politik yang secara intens mentransformasikan wacana khususnya yang bersumber dari pihak-pihak yang netral dan khususnya dari rakyat agar aspirasinya dapat tersalurkan dalam momentum Pilkada.
2. Saran kepada penyelenggara Pemilukada, perlunya adanya sistem dan aturan yang mengatur mengenai penggunaan media sebagai media kampanye aktor politik. Hal ini penting untuk menjaga agar aktor politik tidak mendominasi dan menggunakan media sebagai alat propaganda untuk mendapatkan keuntungan politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Arief, Saiful. 2001. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Averroes Press, Malang bersama Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Bambang, Sugianto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grhadi. Surakarta.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Penerjemah, Cultural Studies Centre. PT. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Basrowi, Dkk. 2012. *Sosiologi Politik*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Bocock, Robert. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi Dan Masyarakat*. Jakarta. Kencana.
- Darma, Aliah Yoce. 2014. *Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif*. PT Refika Aditama. Bandung.
- _____. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya. Bandung.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2005. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication. London.
- Duverger, Muarice. 2002. *Sosiologi Politik*. Penerjemah, Daniel Dhakidae. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efriza. 2012. *Political Explorer sebuah kajian ilmu politik*. Bandung : Alfabeta

- Eriyanto. 2008. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LkiS. Yogyakarta.
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik: Pengantar Kritis*. Penerbit Nusa Media. Ujung Berung. Bandung.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*, Antara Pemahaman Dan realitas. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Penerjemah, Hapsari Dwiningtyas. Rajawali Pers. Jakarta.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengatahuan* (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: *The Harvester Press*). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Franz Magnis Suseno (2010). *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan Dari Penjara. Pustaka Pelajar. Yogyakarta*.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999*. Riset Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hidayat, Imam. 2009, *Teori-Teori Politik*, SETARA press. Malang
- http://www.kompasiana.com/rizkishaffansagarino/politik-kebangsaan-dalam-perspektif-media_5518bc1ea333118b10b65929.
- <http://sumedgang.blogspot.co.id/2012/05/ringkasan-teori-teori-sosial.html>.
- <http://ensiklo.com/2015/10/teori-kelas-penguasa-menurut-gaetano-mosca/>
- Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia: Komunikasi dan Demokratisasi. 1998. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1), 2013
- J. Prihatmoko. Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Kristeva, Santoso. 2011. *Negara Marxis & Revolusi Proletariat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat. (2006). *Jurnalistik: Teori Dan Praktek*. PT Remaja RosdaKarya. Bandung.
- Lavidge, Robert J. & Steiner, Gary A. 1961. *A Model For Predictive Measurement of Advertising Effectiveness*. Journal of Marketing.
- Latif, Yudi. 1997. *Hegemoni Budaya dan Alternatif Media Sebagai Wahana Budaya Tanding*. Bentang. Yogyakarta.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Maliki, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan & Transformasi Politik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Maryani, Eni. 2011. *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. PT Remaja Rosdakarya . Bandung.
- Mosca, Gaetano. 1939. *The Rulling Class*. Mc Graw-Hill. New York.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy Of Communication: Rethinking and Renewal*. London: Sage Publications, Inc.
- Octory, Gadis, 2012, *Lingkungan Sosial & Sosiologi Media*, Makalah, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Pharr, Susan J & Krauss, Ellis S. 1996. *Media And Politics In Japan*. University Of Hawaii Press, Hawaii.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penerjemah, Alimandan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*. Friedrich-Nauman-Stiftung Fur Die Freiheit. Jakarta
- Rivers, William L. 2004. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Penerjemah, Haris Munandar. Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
- Rogers, E. M., & Chaffe, S. H. 1994. *Communication and journalism from "Daddy" Bleyer To Wilbur Schramm: A palimpsest (Journalism Monographs, No. 148)* Columbia, SC: Association for Education in journalism and Mass Communication.

- Rosniar, 2013. *Ideologi Dan Hegemoni Media Cetak*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKI Semarang Press
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan Gagasan Politik Gramsci (Gramsci's Political Thought)*. INSIST & Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Storey, John. 2003. *Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Qalam. Yogyakarta.
- Subiakto H, Ida R. 2014. *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Zuhdhi, Ibrahim. 2012. *Nepotisme 'ala' Reformasi: Pelanggengan Kuasa Orba Lewat Sekongkol Bisnis Politik*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.

BIOGRAFI PENELITI

WAHYUDDIN BAKRI, lahir di Soppeng pada tanggal 29 Agustus 1986. Putera dari pasangan Drs. H. Moh Bakri Andi Laupe dan Hj. Andi Nawirah Andi Suttara, merupakan anak pertama dari dua belas bersaudara. Memulai pendidikan di bangku

Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Desa. Ta'juncu Kab. Soppeng, lanjut di Sekolah Dasar No. 35 Ta'juncu Kab. Soppeng tahun 1994 s.d 1999, kemudian Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Palu tahun 1999 s.d 2005.

Pada tahun 2005 s.d 2012 terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (UIN) tahun 2005 s.d 2012. Selain kuliah di UIN Alauddin, penulis juga melanjutkan studi di LP3i Collage dalam jurusan Bisnis Administrasi tahun 2010 s.d 2012. Pengalaman organisasi, sebagai pengurus pramuka santri Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah pada tahun 2002 s.d 2003, Pengurus OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) 2002 s.d 2003, selaku pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN cabang Gowa Raya pada tahun 2008 s.d 2010, selaku Koordinator Departemen Kerohanian di Organda IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng) pada tahun 2006 s.d 2008